

8_E-book Self Learning

by Slamet Riyanto

Submission date: 14-Feb-2022 09:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 1761668259

File name: 8_E-book_Self_Learning.docx (1.12M)

Word count: 31518

Character count: 204577

Self Learning



Sebagai Embrio
Pengembangan Diri
Anggota Legislatif



Agus Wahyudi, S.H., M.Si.

Editor: Slamet Riyanto, S.T., M.M.



***SELF LEARNING* Sebagai**
Embrio Pengembangan Diri
Anggota Legislatif

UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

***SELF LEARNING* Sebagai
Embrio Pengembangan Diri
Anggota Legislatif**

Agus Wahyudi, S.H. M.Si.

Editor: Slamet Riyanto, S.T., M.M.



**SELF LEARNING
SEBAGAI EMBRIO PENGEMBANGAN DIRI ANGGOTA LEGISLATIF**

Agus Wahyudi

Editor :
Slamet Riyanto

Desain Cover :
Agus Wahyudi

Tata Letak Isi :
Agus Wahyudi

Ukuran : **19**
Viii, 172 hlm, Uk: 17.5x25 cm

ISBN
978-623-02-2894-0

Cetakan Pertama:
Mei, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras
menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH (Grup
Penerbitan CV BUDI UTAMA)**
Anggota IKAPI 0176/DIY/2012

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: deepublish@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia, nikmat, tuntunan, hidayah, dan lindungan-Nya, sehingga buku teks yang berjudul "*Self Learning* Sebagai Embrio Pengembangan Diri Anggota Legislatif" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini dapat diselesaikan diantara kesibukan yang penulis jalani. Meskipun banyak hambatan dalam proses pengerjaannya, pada akhirnya buku ini selesai dengan baik. Buku ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi, Aparatur Sipil negara dan khususnya anggota DPRD itu sendiri.

Buku ini merupakan sebuah hasil kajian penelitian terhadap perilaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan diri (*self-development*) mereka. Seperti kita ketahui bersama bahwa anggota legislatif di era reformasi sekarang ini dituntut untuk lebih memahami aspirasi masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Dengan "belajar mandiri", baik melalui literatur dan referensi yang ada, mereka juga melakukan teknik mentoring kepada senior mereka yang sudah terpilih pada periode sebelumnya.

84

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang memberikan masukan dan diskusinya dalam proses rekonstruksi pemikiran dalam buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah bertindak akomodatif dan responsif terhadap penelitian ini, sehingga buku ini dapat segera diselesaikan tepat waktu.

Tentunya buku ini belumlah sebagai dapat dikaryakan sebagai karya yang sempurna, namun tentunya sebagai ikhtiar untuk menyebarkan ilmu pengetahuan khususnya kajian

pengembangan diri DPRD. Untuk itu besar harapan kami sebagai penulis agar dapatnya buku ini menjadi referensi penting untuk

kajian ke⁸⁶uan yang berkaitan dengan pengembangan anggota legislative di masa yang akan datang.

Sebagai bahan perbaikan, di masa mendatang diharapkan adanya masukan, saran dan kritik membangun dari para pembaca, sehingga bisa semakin mendekati kesempurnaan. Terakhir, semoga buku ini memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Aamiin.

Surabaya, 10 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	DEFINISI PEMBELAJARAN MANDIRI	10
	A. Orientasi <i>Behaviouristik</i> (Tingkah Laku).....	14
	B. Orientasi <i>Cognitivist</i> (Gestalt)	14
	C. Orientasi <i>Humanistik</i>	15
	D. Aliran <i>Social Learning (Cognitive)</i>	17
	E. Aliran <i>Constructivism</i>	18
	F. Aliran <i>Holistic Learning</i>	19
BAB III	PENTINGNYA PEMBELAJARAN MANDIRI BAGI ANGGOTA LEGISLATIF	65
BAB IV	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESADARAN DIRI DAN INISIATIF ANGGOTA LEGISLATIF DALAM BELAJAR MANDIRI	89
	A. Pengalaman Menjadi Anggota Dewan	90
	B. Pengalaman Organisasi/Partai Politik	97
	C. Pengalaman Pendidikan Formal.....	104
	D. Kesiapan Belajar (<i>Readiness to Learn</i>) untuk Meng- <i>upgrade</i> dan Meng- <i>up date</i> Diri	114
BAB V	SUMBER DAN ORIENTASI BELAJAR	121
	A. Sumber Belajar	121
	B. Orientasi Belajar (<i>Orientasion to Learning</i>)	128
BAB VI	STRATEGI NGGOTA LEGISLATIF DALAM MENYUKSESKAN PEMBELAJARAN MANDIRI	137
	A. Motivasi Menjadi Anggota DPRD	138
	B. Adaptasi Awal Terkait Tugas Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) DPRD.....	148
	C. Harapan (Solusi) Anggota DPRD.....	156
BAB VII	PENUTUP	165
	DAFTAR PUSTAKA	167
	PROFIL PENULIS	171

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kegiatan Bimtek DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014- 2019 oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.....	4
Tabel 2	Kegiatan Bimtek/Workshop DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019 Oleh Parpol.....	4
Tabel 3	Rekapitulasi Perda dan Asal Inisiasi Tahun 2014 ...	69
Tabel 4	Rekapitulasi Perda dan Asal Inisiasi Tahun 2015 ...	71
Tabel 5	Rekapitulasi Perda dan Asal Inisiasi Tahun 2016 .	73
Tabel 6	Komposisi Incumbent dan Non-incumbent Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014 – 2019.....	84
Tabel 7	Pengalaman Menjadi Anggota Dewan.....	96
Tabel 8	Pengalaman Berorganisasi dan Berpolitik.....	103
Tabel 9	Pengalaman Pendidikan Formal.....	113
Tabel 10	Meng-up Grade dan Meng-up Date Diri	119
Tabel 11	Sumber Belajar	127
Tabel 12	Orientasi Belajar	134
Tabel 13	Motivasi Menjadi Anggota Dewan	147
Tabel 14	Adaptasi Awal Terkait Tupoksi	155
Tabel 15	Harapan Terkait Tupoksi.....	162



BAB I

PENDAHULUAN

Menjadi anggota legislatif merupakan impian bagi banyak orang. Hal ini terbukti dari fakta banyaknya anggota masyarakat yang saling berlomba-lomba dalam mengikuti kontestasi politik terutama dalam momen pemilihan umum (pemilu). Dari pemilu ke pemilu, data menunjukkan bahwa semakin banyak anggota masyarakat yang berminat untuk ikut terlibat secara langsung dalam proses menjadi anggota legislatif dari mulai seleksi di tingkat partai.

Semakin banyaknya antusiasme masyarakat untuk menjadi anggota legislatif pada dasarnya sangat baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kondisi ini setidaknya memberikan sebuah gambaran bahwa ⁹⁰ pada zaman sekarang, semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap kondisi perkembangan negaranya sehingga memunculkan sikap ingin berkontribusi terhadap perjalanan sejarah pembangunan Indonesia ke depan.

Namun demikian, banyak diantaranya masyarakat yang belum memahami bahwa menjadi seorang anggota legislatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Sebagai seorang legislator tentunya banyak hal yang perlu dipelajari baik dalam hal yang bersifat teknis maupun dalam hal yang bersifat konseptual. Hal-hal tersebut tentunya menjadi sebuah kewajiban untuk dipelajari mengingat seorang anggota legislatif pada dasarnya terikat oleh peraturan yang bersifat birokratis. Dengan demikian, maka setiap gerak-gerik seorang anggota legislatif harus senantiasa memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Bagi sebagian orang, menjadi anggota legislatif merupakan sebuah pengalaman yang baru mengingat minimnya pendidikan yang diberikan oleh partai sebagai lembaga yang mengunsungnya. Oleh karena itu tidak jarang seorang anggota legislatif mengalami kebingungan dalam menjalankan tugasnya terkait fungsi, tugas, dan kewajibannya yang sangat berat, rumit, dan kompleks dalam mengemban amanat rakyat, menentukan dan mengawal kebijakan pemerintahan daerah, pengendali anggaran, serta mengontrol, dan mengawasi pembangunan di wilayahnya.

Dalam ⁷⁵ UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, UU No. 27/2009, ⁷¹ UU No. 23/2014, maupun dalam UU No. 17/2014 disebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD akan berkorelasi secara langsung dengan kualitas

124

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Dengan demikian, upaya-upaya dalam rangka peningkatan kompetensi anggota DPRD sudah semestinyadilakukan secara terprogram dan berkelanjutan baik oleh partai politik, sekretariat DPRD, maupun secara mandiri.

7

Sebenarnya, dalam bab IV Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan hak pada bagian kesatu umum pasal 8 dan 9 disebutkan bahwa anggota DPRD memiliki hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan demikian, meskipun Parpol maupun Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sudah menyelenggarakan Diklat/Bimtek/workshop, namun kuantitasnya masih dianggap minim. Terkait dengan hal masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

Namun tersebut, tercatat bahwa sejak anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 terpilih, hanya ada satu kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti tertera pada tabel di bawah ini:

106

69

11

11

122

64 **Tabel 1**

Kegiatan Bimtek DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019 oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

No	Tema	Waktu	Jumlah Peserta
1	Penajaman Kebijakan dan anggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan Masyarakat Jawa Timur yang Berdaya dan Mandiri di Era Undang-undang Desa	28-30 September 2015	41
2	Penajaman Kebijakan dan anggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan Masyarakat Jawa Timur yang Berdaya dan Mandiri di Era Undang-undang Desa	1-3 Oktober 2015	46

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur (2017).

Di lain pihak, kegiatan Bimtek yang dilaksanakan masing-masing Parpol/fraksi, sejak anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terpilih, sampai dengan saat studi lapangan buku ini dilaksanakan, hanya ada satu sampai dengan dua kegiatan Bimtek yang dilaksanakan. Seperti tertera di bawah ini:

Tabel 2

Kegiatan Bimtek/Workshop DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019 Oleh Parpol

No	Tema	Waktu	Parpol Penyelenggara	Peserta
1	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	26-28 Juni 2015	DPW PKB	13

No	Tema	Waktu	Parpol Penyelenggara	Peserta
2	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	20-23 Januari 2015	DPD\ Gerindra	13
3	Membangun Kemandirian Bangsa untuk Kesejahteraan Rakyat	5-7 Juni 2015	DPP Hanura	2
4	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	12-14 Juni 2015	DPW Nasdem	4
5	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	23-25 Oktober 2015	DPW Nasdem	2
6	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	29-31 Mei 2015	DPD PDI-P	19
7	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	12-15 Maret 2015	DPW PKB	10
8	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	16-19 Oktober 2015	DPW PKB	10
9	Peningkatan Kapasitas Keanggotaan Dewan	27-30 Mei	DPW PKS	5

	dalam	Rangka	Me-	2015		
--	-------	--------	-----	------	--	--

Self Learning sebagai Embrio Pengembangan Diri Anggota Legislatif | 5

No	Tema	Waktu	Parpol Penyelenggara	Peserta
	tingkatkan Kinerja Anggota Dewan PKS di Parlemen			
10	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	17-20 Maret 2016	DPW PKB	20
11	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	29-31 Juli 2016	DPD PDI P	19
12	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	14-17 April 2016	DPP Gerindra	13
13	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	30 Sept - 2 Okt 2016	DPP Demokrat	13
14	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	30 Sept - 2 Okt 2016	DPD Golkar	11
15	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	27-30 Mei 2016	DPP PAN	7

6 | Self Learning sebagai Embrio Pengembangan Diri Anggota Legislatif

No	Tema	Waktu	Parpol Penyelenggara	Peserta
16	Implementasi 33 ran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	9-12 Mei 2016	DPW PKS	6
17	Implementasi 33 ran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	29-31 Juli 2016	DPW PPP	5
18	Implementasi 33 ran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	12-14 Agustus 2016	DPP Nasdem	6
19	Implementasi 33 ran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	17-20 Nop 2016	DPW PKB	20
20	Implementasi 33 ran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	1-11 Oktober 2016	DPP Gerindra	13
21	Implementasi 33 ran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	1-4 Nopember 2016	DPP PAN	7
22	Implementasi 33 ran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	9-12 Mei 2016	DPP PKS	6
23	Implementasi 33 ran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	12-14 Agustus 2016	DPP PPP	5

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur (2017).

Fakta minimnya penyelenggaraan bimtek/workshop tersebut dipandang berkebalikan dengan tuntutan kebutuhan standar kompetensi para anggota DPRD yang sangat besar. Hal ini mengingat DPRD dan pemerintah daerah harus mampu melaksanakan azas *check and balances* dalam menciptakan *good governance* di daerahnya masing-masing.

Kondisi seperti ini juga kemudian melahirkan kenyataan bahwa kemampuan para anggota DPRD masih relatif di bawah kemampuan birokrat pemerintah daerah (Thoha, 2002). Hal tersebut yang kemudian memunculkan kesan tentang pihak eksekutif yang merasa kewalahan menghadapi sikap para anggota DPRD, karena pada umumnya mereka belum memahami tupoksi dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan di tingkat daerah.

Dalam hal menjalankan tugasnya, DPRD memiliki dua fungsi. ⁸ *Pertama*, DPRD sebagai representasi rakyat dituntut memiliki sensitivitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam menyerap, merangkum, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. *Kedua* sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dituntut untuk memiliki kapasitas teknokratik yang memadai sehingga dapat menjadi mitra yang seimbang bagi eksekutif. Peran tersebut seringkali belum dibarengi dengan pelaksanaan fungsi DPRD yang optimal (Thoha, 2002).

Agar keseluruhan fungsi anggota DPRD bisa maksimal dijalankan, maka anggota DPRD harus memiliki kompetensi. Menurut Thoha (2002), persoalan yang kerap ditemukan pada

anggota DPRD adalah dalam hal menjalankan fungsi legislasi, seperti:

1. Permasalahan yang sering terjadi dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD di beberapa daerah pada umumnya adalah ¹²³ dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Sebagian besar anggota DPRD ini masih sulit memahami substansi rancangan peraturan daerah. Biasanya proses pembahasan rancangan peraturan cukup lancar, namun pada proses analisis anggota DPRD pada isi dan implikasi yang ditimbulkan dari penerapannya di bidang politik, sosial, dan ekonomi masih dangkal.
2. Dalam menetapkan suatu Perda, terdapat 4 (empat) hirarki kompetensi yang perlu dikuasai oleh para anggota DPRD, yaitu; ²⁵ pemahaman tentang hukum dan peraturannya, teknik tentang pembuatan peraturan, teknik penggunaan istilah nomenklatur hukum dan pemerintahan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya masih banyak yang tidak memiliki kualifikasi tersebut.

Dalam pembahasan rancangan Perda, banyak anggota DPRD yang tidak nyambung. Bila terdapat pasal-pasal yang tidak disetujui anggota DPRD, mereka masih belum mampu mengemukakan argumentasinya dengan baik. Karena anggota DPRD tidak menguasai seluruh permasalahan, maka dilibatkan sejumlah ahli dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dan RAPBD. Minimnya kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasi ini menjadi hal yang sangat penting mengingat aspek implementasi

8 penggunaan wewenang pembentukan Perda sangat tergantung kepada kemampuan anggota DPRD yang terkait legislasi dalam hal merumuskan rancangan Perda. Praktiknya selama ini, dan hampir di seluruh lembaga dewan, tidak banyak inisiatif Perda yang dihasilkan langsung dari lembaga DPRD. Kelemahan DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan Perda seharusnya dapat dikurangi jika kapabilitas anggota DPRD cukup memadai.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sikap semangat dari anggota DPRD untuk terus belajar secara mandiri. Dengan sikap semangat pembelajaran mandiri tersebut maka kemudian akan meningkatkan kompetensi pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.



BAB II

DEFINISI PEMBELAJARAN MANDIRI

Fenomena kemandirian dalam belajar dijelaskan pada berbagai literatur dengan menggunakan label atau istilah konsep pembelajaran mandiri atau *self-directed learning* (Candy, 1991: Hiemstra, 1998: Knowles, 1975: Moore, 1986: Moore & Kearsley, 1996). Konsep *self-directed learning* juga digunakan oleh Bandura (1986) untuk menjelaskan tentang individu mandiri yang dalam mengambil keputusan tidak tergantung pada konsep stimulus respon seperti yang dijelaskan oleh teori belajar klasik.

Candy (1991) mengungkapkan bahwa istilah pembelajaran mandiri merupakan istilah yang berkembang pada bidang pendidikan, pengajaran, dan penelitian orang dewasa. Penggunaan istilah pembelajaran mandiri terjadi karena kemandirian dihubungkan dengan karakteristik orang dewasa yang dianggap mandiri secara psikologis. Karakteristik mandiri ini membedakan orang dewasa dengan anak-anak dan remaja.

Lebih jauh, Knowles (1975) menjelaskan bahwa istilah pembelajaran mandiri atau *self directed learning* memiliki beberapa

label istilah dalam berbagai literatur. Antara lain: *self planned learning, inquiry method independent learning, self education, self-instruction, self-teaching, self study*; dan *autonomous learning*. Knowles (1975) mendefinisikan pembelajaran mandiri (*self-directed learning*) sebagai suatu proses yang menunjukkan bahwa seseorang mengambil inisiatif, baik dengan atau tanpa bantuan orang lain, dalam melakukan diagnosis kebutuhan-kebutuhan belajar mereka, merumuskan tujuan-tujuan belajar, mengidentifikasi sumber-sumber belajar, memiliki dan melaksanakan strategi belajar yang sesuai, dan mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri. Selaras dengan definisi Knowles, Hiemstra (1998) mengemukakan bahwa pembelajaran mandiri dapat dilihat sebagai semua bentuk belajar yang menunjukkan bahwa individu memiliki tanggung jawab utama untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi usahanya.

Baik definisi yang dikemukakan oleh Knowles maupun Hiemstra menunjukkan kata kunci dalam pembelajaran mandiri, yaitu adanya "inisiatif" dari seseorang untuk mengelola belajarnya, atau yang dijelaskan oleh Hiemstra (1994) sebagai sikap proaktif dalam mengelola belajarnya. Definisi yang dikemukakan oleh Knowles dan Hiemstra juga menjelaskan bahwa pembelajaran mandiri adalah tipe belajar yang dibedakan dengan belajar yang diarahkan oleh orang lain atau *teacher-directed learning*. Pada *teacher-directed learning*, pembelajar lebih bersikap reaktif dalam proses belajar yang diarahkan oleh guru. Sedangkan definisi pembelajaran mandiri menunjukkan bahwa subjek yang terlibat

kegiatan pembelajaran mandiri melakukan aktivitas mengatur (*regulate*), mengontrol (*control*), atau melakukan (*conduct*) kegiatan belajar mereka (Jarvis, 1992).

Seseorang yang memiliki kemampuan pembelajaran mandiri yang tinggi atau pembelajar yang mandiri (*self-directed learner*) digambarkan sebagai orang yang mampu mengontrol proses belajar (Guglielmino & Guglielmino, 1991), memiliki konsep diri yang positif dan lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan dibandingkan dengan mereka yang kemandirian dalam belajarnya rendah (Sabbaghian, 1980), mempergunakan bermacam-macam sumber belajar, motivasi dari dalam dirinya (*internal motivation*), dan memiliki kemampuan mengatur waktu (Guglielmino & Guglielmino, 1991). Gage dan Berliner (1998) dalam buku *Educational Psychology* menggunakan konsep *self-directed learning* untuk menjelaskan tentang belajar secara individual (*individual instruction*) atau belajar yang dilakukan oleh orang dewasa pada pendidikan terbuka (*open education*).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik sebuah pengertian bahwa *self directed learning* adalah peningkatan pengetahuan, keahlian, prestasi, dan pengembangan diri individu yang diawali dengan inisiatif sendiri dengan perencanaan belajar sendiri (*self planned*) dan dilakukan sendiri (*self conducted*), menyadari kebutuhan belajar, tujuan belajar, membuat strategi belajar, menilai hasil belajar, serta memiliki tanggung jawab sendiri menjadi agen perubahan dalam belajar.

Secara umum teori pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok orientasi, dimana ke-enam teori tersebut dapat diterapkan untuk pembelajaran pada semua kelompok usia serta pada semua *event* pembelajaran (Swanson & Holton, 2009):

A. Orientasi *Behaviouristik* (Tingkah Laku)

39

Orientasi menurut aliran tingkah laku (*behavioristik*) adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Artinya belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Para tokoh yang banyak berkarya dalam aliran ini antara lain; Thorndike (1911); Pavlov (1936); Wathson (1963); Hull (1943); Edwin R. Guthrie (1959); dan Skinner (1968). Aliran ini berpandangan bahwa proses pembelajaran adalah perubahan perilaku melalui dorongan dari lingkungannya. Tujuan yang dicapai adalah perubahan perilaku yang diinginkan, sedangkan peran dari guru dalam proses pembelajaran adalah mengatur lingkungan agar mendapatkan tanggapan yang diinginkan. Manifestasinya dalam pembelajaran orang dewasa adalah perilaku yang objektif, hasil kompetensi yang berasal dari proses pendidikan, dan pengembangan kemampuan.

B. Orientasi *Cognitivist* (Gestalt)

Orientasi ini muncul sebagai respon langsung terhadap batas teori tingkah laku, terutama untuk pendekatan

pembelajaran manusia. Para tokoh yang banyak berkarya pada aliran ini adalah Kurt Koffka (1941), Wolfgang Kohler (1967), Kurt Lewin (1947), Jean Piaget (1980), David Ausubel (2008), Bruner (1963), Edward E. Tolman (1959), dan Robert Gagne (1985).

Aliran ini berpandangan bahwa proses pembelajaran adalah proses yang terjadi di dalam mental manusia yang meliputi wawasan, proses informasi, ingatan, dan persepsi. Wilayah cakupannya meliputi struktur kognitif manusia. Tujuannya adalah kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilan untuk belajar lebih baik. Sedangkan peran guru di sini adalah struktur isi dari kegiatan pembelajaran. Sedangkan manifestasinya adalah pengembangan kognitif, kecerdasan, pembelajaran, memori sebagai fungsi dari usia, dan pembelajaran bagaimana cara belajar.

C. Orientasi *Humanistik*

Humanisme tidak pernah muncul sebagai teori belajar, melainkan sebagai pendekatan umum untuk psikologi. Karya Maslow dan Rogers, merupakan inti dari psikologi humanistik. Buhler (1971) seorang psikolog humanistik terkemuka menemukan asumsi-asumsi inti dari humanisme, yaitu:

1. Secara umum, orang adalah subjek utama dari psikologi humanistik. Psikologi humanistik berkaitan dengan pengetahuan tentang sejarah hidup seseorang;
2. Eksistensi dan niat dari manusia juga merupakan hal yang

penting;

3. Tujuan hidup manusia merupakan hal yang sama pentingnya;
4. Kreativitas manusia mendapatkan tempat yang utama;
5. Psikologi humanistik sering diterapkan untuk terapi kejiwaan.

Selanjutnya Rogers (1980) mengemukakan prinsip-prinsip belajar yang signifikan dengan mengatakan bahwa pembelajaran harus memiliki karakter berikut ini:

1. Keterlibatan pribadi yang mencakup aspek afektif dan kognitif harus datang dari dalam diri seseorang.
2. Rasa penemuan juga harus datang dari dalam.
3. Belajar membuat perbedaan dan perilaku, sikap dan kepribadian peserta didik.
4. Peserta didik mengevaluasi dirinya, yaitu mereka dapat menentukan bagaimana pengalaman belajar yang memenuhi kebutuhannya.
5. Intinya adalah ketika pengalaman belajar sedang terjadi, maka peserta didik masuk dalam totalitas pengalaman tersebut.

Orientasi humanistik melihat bahwa proses belajar merupakan suatu tindakan pribadi untuk memenuhi potensi diri manusia. Cakupannya meliputi kebutuhan pada segi afektif dan kognitif. Sedangkan kegunaannya untuk mengaktualisasi dirinya menjadi lebih otonom. Peran guru di sini adalah memfasilitasi pengembangan manusia seutuhnya. Sedangkan manifestasinya

dalam bentuk pembelajaran orang dewasa dan diarahkan pada kemandirian belajar.

D. Aliran *Social Learning (Cognitive)*

Social learning berfokus pada bagaimana orang belajar dengan mengamati interaksi dengan orang lain. Selain itu, teori ini juga melihat bagaimana pembelajaran itu terjadi dalam konteks sosial. Sebagian orang melihat bahwa *social learning* sebagai sesuatu hal yang sifatnya khusus dalam kaitannya dengan berperilaku manusia, karena mencerminkan bagaimana individu belajar dari orang-orang yang ada di lingkungannya. Sebagian lainnya melihat bahwa *social learning* sebagai meta-teori yang terpisah karena peserta didik juga aktif membuat pemaknaan dari interaksi tersebut. Teori pembelajaran sosial memberikan kontribusinya bahwa beragam orang selalu meniru perilaku orang lain. Inti dari proses pembelajaran sosial adalah bagaimana kita meniru teladan orang lain, tentu saja hal ini bertentangan langsung dengan aliran behavioris, dimana dalam teori ini, peserta didik harus melakukannya sendiri yang diperkuat melalui proses pembelajaran.

Tokoh dari teori ini adalah Albert Bandura dan Rotter, dimana mereka memandang bahwa proses pembelajaran adalah dengan mengamati interaksi dengan orang lain dalam konteks sosial. Cakupan adalah interaksi antarmanusia, perilaku, dan lingkungannya. Kegunaannya adalah peran dan perilaku model

baru, sedangkan guru berperan model serta panduan peran dan perilaku yang baru. Manifestasi dalam pembelajaran orang dewasa adalah untuk sosialisasi, peran sosial, pendampingan, serta *locus of control*.

E. Aliran *Constructivism*

Sebagai suatu yang kontroversial, terutama dalam versi yang lebih radikal, konstruktivisme muncul sebagai perspektif yang berguna untuk beberapa situasi pembelajaran orang dewasa (Wiswell dan Ward, 1987). Aliran konstruktivisme menekankan bahwa semua pengetahuan terikat pada konteks dan para individu membuat makna pribadi dari pengalaman belajar mereka. Dengan demikian pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari konteks dimana ia digunakan. Selain itu mereka juga menekankan sifat kumulatif dari belajar yaitu bahwa informasi baru, harus dikaitkan dengan informasi lain yang sudah ada, agar peserta didik dapat mempertahankannya atau memanfaatkannya. Untuk orang dewasa, pengalaman mungkin dapat dikonseptualisasikan sebagai upaya menciptakan corong raksasa pengetahuan sebelumnya, dimana informasi yang baru masuk ke bagian atas corong mengalir ke bawah dan akhirnya jatuh keluar, kecuali “tongkat” yang menggambarkan beberapa unsur pengetahuan sebelumnya. Peran fasilitator di sini adalah untuk membantu peserta didik membuat makna terhadap informasi yang baru. Tokoh tokoh pada teori ini adalah; ⁵⁵ Candy, Dewey, Lave, Piaget, Rogoff, Von Glaserfeld, dan Vygotsky.

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, aliran ini melihat bahwa pembelajaran itu merupakan konstruksi makna dan pengalaman. Sedangkan cakupan dari pembelajaran ini adalah konstruksi realitas internal oleh individu. Tujuan pendidikan dari teori ini adalah membangun pengetahuan, dimana peran guru di sini adalah sebagai memfasilitasi dan menegosiasikan makna dengan peserta didik. Sedangkan manifestasi dalam pembelajaran orang dewasa adalah *experiential learning*, pembelajaran yang diarahkan pada diri sendiri, transformasi perspektif, dan praktik reflektif.

F. Aliran *Holistic Learning*

Teori Belajar Holistik untuk orang dewasa dikemukakan oleh Baiyin Yang (2003), dimana teori ini mungkin memainkan peran yang unik dengan mengintegrasikan teori belajar lainnya yang membedakan antara teori ini dengan teori yang lain, jadi bukan pada kesamaannya. Tokoh tokoh dari teori holistik adalah Baiying Yang, Jarvis, dan Paker.

Dibandingkan dengan 5 teori yang lain, teori ini melihat bahwa proses pembelajaran melibatkan aspek pengetahuan eksplisit, implisit, dan emansipatoris. Sedangkan teori ini terjadi sebagai akibat dari interaksi dengan dan antara sisi pengetahuan. Tujuan pendidikan dari teori ini adalah sistematisasi, partisipasi, dan transformasi. Sedangkan peran dari guru di sini sebagai fasilitator. Manifestasi dari pembelajaran

orang dewasa pada teori ini adalah holistik, dialektikal perspektif, dan dinamis.

Keenam kelompok basis orientasi teori pembelajaran tersebut dapat diterapkan untuk pembelajaran mandiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan perspektif teori andragogi Malcolm Knowles. Namun yang paling dominan dan selaras untuk diaplikasikan adalah pada poin orientasi humanistiknya. Yakni terutama pada asumsi-asumsinya tentang; eksistensi dan niat dari manusia, tujuan hidup manusia, dan kreativitas manusia. Selain itu, kemudian sebangun juga dengan prinsip-prinsip belajar, seperti; keterlibatan pribadi yang mencakup aspek afektif dan kognitif yang harus datang dari dalam diri seseorang, rasa penemuan juga harus datang dari dalam, belajar membuat perbedaan dan perilaku, sikap dan kepribadian peserta didik, peserta didik mengevaluasi dirinya, yaitu mereka dapat menentukan bagaimana pengalaman belajar yang memenuhi kebutuhannya.

Intinya adalah, ketika pengalaman belajar sedang terjadi, maka peserta didik masuk ke dalam totalitas pengalaman tersebut. Orientasi humanistik melihat bahwa proses belajar merupakan suatu tindakan pribadi untuk memenuhi potensi diri manusia. Cakupannya meliputi kebutuhan pada segi afektif dan kognitif. Sedangkan kegunaannya yaitu untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri untuk menjadi lebih bersifat otonom. Sementara itu peran guru di sini adalah untuk memfasilitasi pengembangan manusia

seutuhnya. Sedangkan manifestasinya adalah dalam bentuk kemandirian belajar pada proses pembelajaran orang dewasa.

⁴⁷ Istilah andragogi seringkali dijumpai dalam proses pembelajaran orang dewasa (*adult learning*), baik dalam proses pendidikan nonformal (pendidikan luar sekolah), informal, maupun dalam proses pembelajaran pendidikan formal. Pada pendidikan nonformal dan informal teori dan prinsip andragogi digunakan sebagai landasan proses pembelajaran pada berbagai satuan, bentuk, dan tingkatan (*level*) penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal.

Pada pendidikan formal andragogi seringkali digunakan pada proses pembelajaran pada tingkat atau level pendidikan menengah ke atas. Namun demikian dalam menerapkan konsep, prinsip andragogi pada proses pembelajaran sebenarnya tidak secara mutlak harus berdasar pada bentuk, satuan tingkat atau level pendidikan, akan tetapi yang paling utama adalah berdasar pada kesiapan peserta didik untuk belajar. Kondisi itu terjadi karena kita menganggap bahwa semua murid, peserta didik (warga belajar) itu adalah sebagai orang dewasa yang diasumsikan memiliki kemampuan yang aktif dalam merencanakan arah belajar, memiliki bahan, memikirkan cara terbaik untuk belajar, menganalisis, dan menyimpulkan serta mampu mengambil manfaat dari belajar atau dari sebuah proses pendidikan. Fungsi guru dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, bukan menggurui, sehingga relasi antara guru dan peserta didik

(murid, warga belajar) lebih bersifat *multicomunication* (Knowles, 1970).

Oleh karena itu, andragogi adalah suatu bentuk pembelajaran yang mampu melahirkan sasaran pembelajaran (lulusan) yang dapat mengarahkan dirinya sendiri dan mampu menjadi guru bagi dirinya sendiri. Dengan keunggulan-keunggulan itu andragogi menjadi landasan dalam proses pembelajaran pendidikan nonformal dan informal. Hal ini terjadi karena pendidikan nonformal dan informal formula pembelajarannya diarahkan pada kondisi sasaran yang menekankan pada peningkatan kehidupan, pemberian keterampilan, dan kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang dialami, terutama dalam hidup dan kehidupan sasaran di tengah-tengah masyarakat.

Untuk memahami secara mendasar tentang konsep teori dan prinsip andragogi, pada bagian ini akan diuraikan secara tuntas tentang beberapa definisi andragogi dari berbagai ahli. Dugan (1995) mendefinisikan andragogi lebih kepada asal katanya, andragogi berasal dari bahasa Yunani. Andra berarti manusia dewasa, bukan anak-anak. Sehingga menurut istilah, andragogi berarti ilmu yang mempelajari bagaimana orang tua belajar. Definisi tersebut sejalan dengan apa yang diartikan Sudjana dalam bukunya *Pendidikan Nonformal Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendukung Azas* (2005) yang menyebutkan bahwa, andragogi berasal dari bahasa Yunani "andra dan agogos". Andra berarti orang dewasa dan agogos berarti memimpin atau membimbing,

terutama dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa.

"Orientasinya adalah agar apa yang sekarang kita pelajari, dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Ini menjadi pilihan semua orang dewasa saya rasa".

HW pun sependapat dengan RA dan NS bahwa ¹Bagi orang dewasa, belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu segera.

"Ya, orientasi pembelajaran mandiri merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi kami. Kami di DPRD Jawa Timur, karena ndak punya staf ahli dan tenaga ahli, akhirnya wajib melakukan pembelajaran mandiri, untuk bisa menghadapi permasalahan yang ada terkait tupoksi dewan dan meningkatkan kompetensi dan kinerja kami dari hari ke hari".

Menurut MS sangat urgen melakukan pembelajaran diri untuk peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tupoksinya. Mengingat terbatasnya kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/ *workshop* yang dilaksanakan oleh Parpol pengusung maupun sekretariat dewan.

*"Biar langsung tune in jadi anggota dewan yaharus belajar lah. Belajar yang lebih berorientasi menangani masalah. Karena di sini kan problem solving. Harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di luar yang harus kita perjuangkan di sini. Tips harus serius dalam melakukan pembelajaran mandiri jika ingin menjadi anggota DPRD yang mumpuni. Saya punya prinsip saya harus bisa. Terbatasnya pelatihan/bimbingan teknis/ *workshop* yang dilaksanakan oleh Parpol pengusung*

maupun sekretariat dewan harus disiasi dengan pembelajaran mandiri”.

AT menanggapi hal senada dengan pernyataan politisi di atas

“Jika bagi saya, pembelajaran mandiri memiliki orientasi untuk dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Khususnya terkait dengan tupoksi dewan. Jika ada persoalan, ya mencari solusinya dengan menggali dan mencari bagaimana cara memecahkannya”.

Begitu pun Gy. Secara singkat menyatakan bahwa orientasi belajarnya secara mandiri tergerak karena adanya kebutuhan belajar bagi orang dewasa untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa.

“Sebagai anggota dewan yang memiliki tiga fungsi utama, seharusnya orientasi pembelajaran mandiri untuk dipergunakan dalam mengatasi persoalan tupoksi”.

MZ, ZL, dan RO memiliki jawaban senada bahwa orientasi pembelajaran mandiri sudah merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksinya dan bermanfaat dalam waktu segera. Menurut MZ:

“Saya melakukan pembelajaran mandiri karena memiliki orientasi kegunaannya dapat dirasakan segera”.

ZL pun menyatakan hal yang sama.

"Orientasi kita melakukan belajar secara mandiri, kaitannya untuk menghadapi permasalahan yang harus segera diselesaikan".

Begitu pun RO memiliki pandangan yang sama, bahwa orientasinya pembelajaran mandiri adalah untuk segera memiliki manfaat dan dapat mengatasi persoalan terkini.

"Banyak persoalan yang dihadapi dan butuh penanganan segera".

Dari data studi tersebut tampak bahwa orientasi belajar (*orientation to learning*) secara mandiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki ¹kecenderungan memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi ¹(*problem centered orientatin*). Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi anggota dewan ¹dan peranan sosialnya. Pembelajaran mandiri ¹lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu segera. Bagi anggota dewan, ¹belajar lebih bersifat untuk dapat dimanfaatkan dalam waktu segera dalam melaksanakan fungsinya. Pembelajaran mandiri juga ²memiliki orientasi pada proses pemahaman dan penemuan masalah serta pemecahan masalah (*problem finding and problem solving*), baik berhubungan dengan masalah kekinian maupun masalah kehidupan di masa depan.

Temuan ini sejalan dengan uraian ² (Knowless, 1977, Unesco, 1988, Kamil, 2001, Saraka, 2001). ² Dari perspektif waktu dan orientasi belajar, orang dewasa memandang belajar itu

sebagai suatu proses pemahaman dan penemuan masalah serta pemecahan masalah (*problem finding and problem solving*), baik berhubungan dengan masalah kekinian maupun masalah kehidupan di masa depan. Orang dewasa lebih mengacu pada tugas atau masalah kehidupan (*task or problem oriented*). Sehingga orang dewasa akan belajar mengorganisir pengalaman hidupnya.

Temuan orientasi pembelajaran mandiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sejalan dengan pendapatnya (Miller and Dollard, 1973) yang menyatakan bahwa proses belajar hanya mungkin tercipta jika peserta didik menginginkan sesuatu, memperhatikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan menerima sesuatu. Miller dan Dollard menegaskan bahwa: "*Learning takes place when something, notice something, does something and receiving something. This, learning in this view requires the interplay of four essential aspects: motivation (the wanting aspect) perception (the noticing aspect), responding (the doing aspect), and reward or reinforcement (the receiving aspect). If any motivation were set to zero, for example or if no reward were forthcoming for responses made, learning would be disputed*"

Belajar dalam konsepsi belajar sepanjang hayat merupakan suatu kebutuhan. Dengan alasan kebutuhan, setiap individu akan mendorong dirinya untuk belajar (*learning to learn*) sehingga dapat mempelajari dan merespons secara cerdas pengetahuan-pengetahuan yang secara eksponensial terus

meningkat dan berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan. Kebutuhan untuk belajar (*need to learn*) merupakan kebutuhan yang paling mendesak dalam rangka meningkatkan peran pendidikan sepanjang hayat. Perubahan dunia secara cepat, sebagai dampak globalisasi, baik di bidang teknologi, informasi, ekonomi jasa, dan tuntutan pasar menuntut individu untuk terus beradaptasi dengan kondisi atau produk baru yang dilahirkan masyarakat maju. Tantangan ke depan cenderung lebih dinamis dan serba cepat. Pertumbuhan cepat dan keusangan informasi mendorong orang belajar terus sepanjang hayat. Pengetahuan dan kemampuan yang telah diperoleh perlu divalidasi ulang secara periodik. Asosiasi kerjasama dalam pembangunan ekonomi menuntut perlunya penyediaan pendidikan profesi lanjutan untuk pekerja (personalia) yang memiliki kualifikasi tinggi.

Berdasarkan hasil studi di atas, ditemukan beberapa kategori orientasi belajar (*orientation to learning*) dalam pembelajaran mandiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yang dike- lompokkan dalam kategori tabel berikut:

Tabel 12
Orientasi Belajar

No.	Orientasi Pembelajaran Mandiri
01.	Memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (<i>problem centered orientation</i>). Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan ke seharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi anggota dewan dan peranan sosialnya.

No.	Orientasi Pembelajaran Mandiri
02.	Untuk dapat dimanfaatkan dalam waktu segera dalam melaksanakan fungsinya.
03.	Proses pemahaman dan penemuan masalah serta pemecahan masalah (<i>problem finding and problem solving</i>), baik berhubungan dengan masalah kekinian maupun masalah kehidupan di masa depan.

Pada dimensi orientasi belajar, hasil studi menjelaskan bahwa dalam pembelajaran mandiri, orientasi belajar (*orientation to learning*) anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (*problem centered orientation*), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Orientasi belajar (*orientation to learning*) mandiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi anggota dewan dan peranan sosialnya. Pembelajaran mandiri lebih bersifat untuk dapat dipergunakan dalam waktu segera.
- b. Orientasi belajar (*orientation to learning*) pembelajaran mandiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur adalah untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal yang terkait dengan tupoksinya.

Belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan dalam waktu segera pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sehingga urgen melakukan pembelajaran mandiri untuk peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tupoksinya. Mengingat terbatasnya kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/*workshop* yang dilaksanakan oleh Parpol pengusung maupun sekretariat dewan.



BAB VI

STRATEGI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM MENYUKSESKAN PEMBELAJARAN MANDIRI

Strategi merupakan sebuah cara yang digunakan ¹⁰⁰ oleh seseorang maupun sekelompok orang dalam upaya mencapai sebuah tujuan. Terkait pembelajaran mandiri anggota legislatif, melalui buku ini menyajikan studi tentang strategi anggota legislatif dalam proses belajar mandiri. Studi ini menunjukkan bahwa untuk dapat mencapai tujuannya, seorang anggota legislatif pertama-tama harus memiliki motivasi yang kemudian dilanjutkan dengan proses adaptasi ketika sudah terpilih. Namun demikian, selain dua hal tersebut, ada hal yang menjadi harapan anggota legislatif terhadap pola kerja maupun institusi-institusi terkait sehingga proses pembelajaran mandiri dapat berjalan dengan cepat dan baik.

Terkait hal-hal tersebut, berikut diuraikan mengenai hasil studi terhadap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang terkait seputar motivasi menjadi anggota DPRD, adaptasi awal terkait fungsi DPRD, dan harapan anggota DPRD terkait tupoksinya.

A. Motivasi Menjadi Anggota DPRD

Motivasi memiliki ⁴³peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorangpun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekadar diketahui, tetapi ²⁶harus diterangkan dalam aktivitas belajar-mengajar.

Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Motivasi adalah sebagai dasar penggerak yang mendorong seseorang untuk belajar. Minat merupakan kecenderungan psikologis yang menyenangkan suatu objek, belum sampai melakukan kegiatan. Namun minat adalah motivasi dalam belajar. Minat merupakan potensi psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi. Bila seseorang sudah termotivasi untuk belajar, maka dia akan melakukan aktivitas belajar dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, motivasi diakui sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar seseorang. Motivasi memegang peranan yang amat penting dalam pembelajaran mandiri.

³²Mengutip pendapat Mc. Donald (Tabrani, 1992), *"motivation is energy change within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction"*. Motivasi adalah sesuatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dari perumusan yang dikemukakan Mc.

Donald ini mengandung tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu:

- 1) motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi,
- 2) motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan (*affective arousal*),
- 3) motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan.

Berikut merupakan hasil studi mengenai berbagai motivasi yang dimiliki oleh masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2014. Seperti misalnya AT anggota Badan Anggaran (Banggar) ini, selain memang *passion*-nya menjadi anggota dewan, ia juga memiliki motivasi untuk melakukan perubahan yang lebih baik di masyarakat.

"Motivasi menjadi anggota dewan karena suka saja. Karena saya tahu dewan ini punya otoritas, ada banyak hal yang bisa dilakukan kaitannya dengan banyak kebijakan yang bisa dituangkan dengan Perda guna kepentingan masyarakat".

Begitupun Gy, sebagai anggota DPRD Jatim daerah pemilihan VII, menjadi anggota dewan memiliki tujuan dan motivasi memperbaiki problem sosial dan memperbaiki kondisi perekonomian di wilayah dapil VII khususnya. Menurut anggota Badan Musyawarah (Banmus) ini, bukan hanya persoalan keluarga miskin, akses baik fisik atau infrastruktur yang ingin diperbaiki, ia juga ingin memperbaiki kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat agar bisa ditingkatkan kesejahteraan mereka.

"Intinya motivasi menjadi anggota dewan ingin mengabdikan diri sepenuhnya untuk rakyat tanpa pamrih".

NS sekretaris Fraksi Gerindra, memiliki motivasi menjadi anggota dewan untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi konstituennya. NS fokus ingin mengangkat kehidupan para petani. Menurutnya, banyak petani yang menderita akibat gagal panen karena padinya diserang hama wereng baik coklat, merah, dan potong leher.

"Motivasi menjadi anggota dewan saya ingin menyumbangkan ilmu saya (pertanian) dan berbuat kepada masyarakat terutama kepada petani melalui Perda No.5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Petani dan Nelayan yang sudah kami buat. Saya juga masih punya utang kepada nelayan. Namun akhirnya utang itu pun saya lunasi setelah dibuatnya Perda khusus untuk nelayan yakni Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan".

MZ prihatin dengan segala bentuk ketimpangan di Kabupaten Sampang. ⁷ Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar yang juga duduk di komisi E ini memastikan dirinya menjadi anggota dewan karena ingin mengawal kepentingan masyarakat Madura. Yang paling utama dia perjuangkan adalah masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta menggagas berdirinya universitas di Sampang.

"Motivasinya menjadi anggota dewan karena melihat disparitas di Madura yang luar biasa. Dalam segala hal, dalam pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, infrastruktur, IPM. Secara jujur disparitas itu bukan karena orang Madura tidak mampu. Disparitas itu terjadi, karena jika boleh saya kritik, kesalahan dari orientasi dari pemerintah sebelumnya tentang prioritas pembangunan sebelumnya di Madura. Saya datang ke sini diharapkan

disparitas itu dapat diperjuangkan agar sisi utara Madura yang tertinggal bisa mengejar kemajuan masyarakat di sepanjang jalan di selatan Madura”.

RA, sebagai wakil rakyat dari dapil VIII yang meliputi Kabupaten/Kota Madiun, Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, dan Jombang, menyampaikan motivasinya menjadi wakil rakyat di Jawa Timur sebagai berikut:

“Motivasi saya di awal adalah melaksanakan komitmen untuk melindungi pertanian di Jatim. Komitmen ini sebagai bentuk perhatian saya terhadap persoalan kerakyatan di Jatim. Oleh karenanya pemerintah harus berani dan mampu menyediakan infrastruktur di pedesaan, sebagai strategi peningkatan produksi tanaman pangan dari regulasi perundang-undangan. Karena dari sekian persen Provinsi Jatim telah memberikan subsidi kepada kabupaten/kota untuk pembangunan infrastruktur di tiap pedesaan. Dalam strategi peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan produktivitas dan mutu hasil, perluasan areal tanam, pengembangan kawasan, pengamanan produksi, serta penguatan kelembagaan pertanian dan dukungan pembiayaan usaha tani harus dilakukan. Untuk kebutuhan penguatan, dirinya mendesak kepada pemerintahan, mulai pusat, provinsi hingga pemerintahan kabupaten/kota untuk memperhatikan keperluan petani. Bentuknya, dengan memberi motivasi kepada UMKM yang ada di masing-masing daerah. Bagaimanapun pertanian dan agrobis harus siap. Karena harus mengawal menghadapi era perang ekonomi, atau MEA. Karenanya perlu ada sosialisasi terkait dengan adanya bank tani guna membantu para petani agar tidak terjerat praktik ijon. Dengan keberadaan bank tani tersebut kian memudahkan petani. Bahkan dengan adanya kemitraan kerjasama seperti menggandeng lembaga di

bidang pertanian, maka kesejahteraan petani bisa terwujud. Regulasi ini merupakan wujud komitmen

eksekutif dan legislatif untuk melindungi pertanian di Jatim. Pemerintah di dalam liberalisasi ini harus mengintervensi di alokasi, distribusi, dan stabilitasi, serta membela yang kecil. Distorsi pasar bebas harus diintervensi pemerintah. Termasuk sektor pertanian. Itu harus diintervensi, misalnya hibah untuk pengolahan pertanian, hand tractor, mini feed mill, tuturnya. Di sisi lain dalam menghadapi MEA yang sudah berjalan sejak 2015 lalu, UMKM di Jatim belum seluruhnya tersertifikasi sehingga terancam kalah dalam persaingan. Karena itu, kami di dewan Jatim mendorong seluruh komponen di Jatim harus serius menggarap pasar dalam negeri agar produk luar tak menguasai pasar dalam negeri”.

51
Motivasi utama ZL, sebagai wakil rakyat DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, adalah memperhatikan serius wilayahnya yang terdampak lumpur Lapindo yang banyak membawa korban serta dampak pada lingkungan hidup sekitarnya.

“Saya berusaha agar para korban terdampak yang sampai saat ini belum mendapatkan uang ganti rugi penuh akan diperjuangkan. Ini motivasi saya sekaligus tugas saya sebagai wakil rakyat yang harus memperjuangkan warga Sidoarjo khusus bagi mereka yang masuk korban lumpur Lapindo yang kini belum menerima ganti rugi atau kah uang yang diterimanya masih kecil. Dari semburan lumpur Lapindo ini banyak sekali dampaknya yang dirasakan masyarakat sekitar. Mulai lingkungan hidup serta pendapatan masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, yang selama ini menjadi petani dan petambak. Karenanya kini mereka bekerja secara serabutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sementara pemerintah pusat dan PT Minarak yang diharapkan segeramelunasi uang ganti rugi hingga kini tak kunjung selesai. Selain persoalan lumpur Lapindo, motivasi

saya jadi anggota dewan di Jawa Timur, ingin memperjuangkan petani tambak yang setiap tahun mengalami kerugian puluhan juta akibat ikan yang mau dipanen mati yang diakibatkan pencemaran lingkungan berupa keracunan limbah. Padahal di satu sisi, mereka itu penyumbang Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Kab. Sidoarjo. Mengingat luasan tambak di Sidoarjo mencapai 11.500 hektar. Bayangkan jika hasil panen tambak yang sebegitu luasnya mati, maka dapat dipastikan PAD Kab. Sidoarjo akan turun. Ini karena mereka penyumbang PDRB tertinggi. Di sisi lain mereka enggan bekerja lagi sebagai petani tambak. Ditambahkannya, gagal-nya petani tambak melakukan panen dikarenakan ikan-ikan yang ada keracunan limbah pabrik. Ini karena perusahaan yang ada di sepanjang sungai membuang limbahnya saat malam hari, yang notabene jauh dari pengawasan. Namun dampaknya sangat luar biasa, dimana akibat aksi nakal mereka, ribuan hektar tambak gagal panen. Jika ini tetap dibiarkan oleh pemerintah, tanpa ada campur tangan, maka dipastikan para petani akan gulung tikar. Di satu sisi tentunya akan menjadi beban Pemkab. Sidoarjo karena akan semakin banyak pengangguran".

HW, memiliki motivasi kuat untuk menjadi anggota dewan karena terdorong ingin membangun Jawa Timur melalui perbaikan dari sisi infrastruktur dan konsen terhadap penanganan bencana alam.

"Saya ingin konsern untuk melakukan advokasi terhadap seluruh persoalan yang menimpa masyarakat Jatim, khususnya di bidang infrastruktur serta bencana alam. Karena jika saat musim ke- marau ada 12 wilayah di Jatim mengalami kekeringan. Dan dipastikan wilayah tersebut juga akan dilanda banjir saat musim hujan tiba. Untuk itu diperlukan antisipasi sejak awal, di antaranya

pengerukan saluran, penyiapan pompa air hingga pada memperbanyak lahan resapan. Termasuk Pulau Madura yang beberapa tahun ini dilanda banjir hebat tentunya dibutuhkan perhatian ekstra”.

7

RO mengatakan, mengemban tugas kedewanan sebagai wakil rakyat adalah pekerjaan yang harus dijunjung tinggi dan selayaknya dikerjakan dengan jujur dan penuh pengabdian. Itu artinya seorang pimpinan harus lebih mementingkan rakyat di atas segalanya.

“Motivasi saya menjadi anggota dewan salah satunya memiliki cita-cita dan bertekad keras dengan mengabdikan diri bekerja untuk kebaikan rakyat. Saya melihat, banyak sekali hal yang harus dilakukan perbaikan demi kesejahteraan masyarakat, khususnya Jatim. Poin penting tersebut di antaranya, perbaikan infrastruktur jembatan, jalan, dan pengairan/dam. Ketika ke-tiga aspek tersebut telah diperbaiki, maka akan berpengaruh untuk kelancaran masyarakat dalam mencari nafkah demi kemakmuran keluarga. Di lingkungan pertanian, saya dilahirkan dan dibesarkan, membuat saya paham betul betapa susahny mereka untuk mendapatkan penghasilan. Seperti halnya yang dialami oleh hampir seluruh petani tebu yang ada di Jatim, yang sering dirundung kesusahan karena hasil panennya yang sudah disetorkan ke pabrik gula belum dapat dibayar, karena gula yang telah diproduksi tidak dapat terserap ke luar Jatim. Hal ini disebabkan karena di wilayah penjualannya dipenuhi gula rafinasi. Tahun 2014 saat saya baru masuk gedung dewan, merupakan tahun yang memprihatinkan bagi petani tebu. Harga gula jauh di bawah ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 8.500. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah ketika pemerintah menetapkan harga pokok petani. Petani bertubi-tubi dihantam masalah, selain harga gula anjlok serta rendaman tebu yang tidak sesuai

dengan harapan, kredit juga susah diperoleh. Untuk menembus pupuk, petani kelimpungan. Akibatnya, banyak tanaman tebu yang tidak terurus. Kondisi tersebut memengaruhi musim giling. Ibaratnya tebu petani sudah kurang gizi dan kurang nutrisi. Melihat kenyataan tersebut, saya ingin terus berjuang agar gula-gula yang kini memenuhi gudang sejumlah pabrik gula bisa terserap di luar Jatim. Saya juga berharap pemerintah memperhatikan nasib petani tebu. Pemerintah diminta bisa melahirkan varietas tebu, sehingga petani bisa meningkatkan produktivitasnya dan menghasilkan tebu dengan angka rendeman yang tinggi. Dan pada akhirnya negara bisa berswasembada gula yang berdaya saing tinggi”.

Motivasi MS menjadi anggota dewan karena ia terenyuh dengan dunia pendidikan saat ini. Ketua Fraksi Nasdem-Hanura ini menceritakan, dunia pendidikan yang berada di Daerah Pilihannya Jawa Timur II yakni Kabupaten/Kota Pasuruan dan Probolinggo, hampir seluruh anak-anak terpaksa ⁸³ putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu; di Aliyah, SMA, atau SMK.

“Semua ini dikarenakan jarak sekolah yang jauh dari rumah mereka yang hampir mencapai puluhan kilometer. Satu sisi lain mereka tidak memiliki kendaraan untuk menuju sekolah. Yang terjadi selama ini banyak dari mereka hanya dapat melanjutkan sekolah di tingkat SD hingga SMP saja. Selanjutnya dia memilih untuk membantu orang tua mereka sebagai petani. Sementara itu disatu sisi kebijakan pemerintah adalah wajib belajar 12 tahun atau sampai pada tingkat SLTA. Untuk itu ke depannya, pemerintah harus memberikan kemudahan akses bagi anak-anak ini untuk dapat melanjutkan sekolah hingga memenuhi wajib 12 tahun. Di antaranya pendirian sekolah serta angkutan sekolah bagi mereka. Maklum hampir

sebagian besar dari mereka memiliki ekonomi pas-pasan. Persoalan lainnya termasuk gizi yang harus diperhatikan penuh oleh Pemprov Jatim. Ini tidak lain dari mereka yang hidupnya pas-pasan. Sementara di satu sisi anak-anak dituntut untuk sekolah dengan menempuh jarak yang jauh sehingga anak-anak akan lelah saat belajar di kelas. Selain itu, juga soal kurangnya minat para pemuda di desa bekerja di bidang pertanian. Ini tak lain karena di pedesaan banyak berdiri pabrik-pabrik yang menjanjikan upah yang cukup menggiurkan. Sementara jika menjadi petani mereka hanya menerima upah kecil. Tak heran saat ini sangat sulit ditemui petani-petani muda. Sebaliknya petani yang ada saat ini usianya sudah lanjut. Selama ini Pemprov Jatim berkomitmen menjadi wilayah yang agrobis. Untuk itu, jika pemerintah menginginkan ada petani muda yang mau terjun di bidang pertanian, diperlukan adanya sebuah sistem pertanian yang bagus berupa teknik penanaman yang baik serta kemudahan memperoleh bibit unggul. Itu tentunya harus didukung dengan teknik penanaman yang bagus, termasuk soal penjualan dan pengemasannya harusnya dilakukan dengan cara yang bagus. Apalagi Gubernur Soekarwo sudah banyak memberikan perhatian kepada petani berupa kredit tani. Hal ini yang tentunya harus didukung penuh. Namun demikian harus ada pendampingan dari SKPD yang bersangkutan agar kredit tani yang seharusnya untuk modal kerja ini tidak disalahgunakan penggunaannya dan dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Untuk itu kami nanti akan mengusulkan agar ada tenaga pendamping untuk kredit tani tersebut. Itulah motivasi saya menjadi anggota dewan ingin memperbaiki persoalan tersebut”.

Dari data studi tersebut tampak bahwa masing-masing anggota dewan memiliki motivasi yang beragam menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Namun kesamaannya, yaitu dengan otoritasnya ingin mengabdikan kepada masyarakat

melalui kompetensi yang mereka miliki. Dengan otoritas yang dimilikinya, diharapkan dapat melakukan perubahan yang lebih baik di masyarakat. Dengan otoritasnya, ada banyak hal yang bisa dilakukan kaitannya dengan banyak kebijakan yang bisa dituangkan dengan Perda guna kepentingan masyarakat.

Orang dewasa memandang bahwa *"all living is learning. Learning is not only preparation for living the very essence of living, the very essence of living it self"*. Setiap peserta didik memiliki pola kesiapan yang berbeda dengan warga lainnya terutama dalam hal kekuatan motivasi (*inner motivations*) seperti: *needs for esteem (self esteem), urge to grow, the satisfaction for accomplishment, the need to know something specific and curiosity to learn"* (Inggalls, 1973, Knowless, 1977, Unesco, 1988, Saraka, 2001).

Berdasarkan hasil studi di atas, ditemukan motivasi untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yang dikelompokkan dalam kategori tabel di bawah ini:

Tabel 13
Motivasi Menjadi Anggota Dewan

No.	Motivasi menjadi anggota dewan
01.	Dengan otoritas yang dimiliki, ingin membangun Jawa Timur melalui fungsi, hak, dan kewajibannya anggota legialatif.
02.	Dengan otoritas yang dimilikinya, ingin dapat melakukan perubahan yang lebih baik di masyarakat.
03.	Dengan otoritasnya, ingin ada banyak hal yang bisa dilakukan kaitannya dengan banyak kebijakan yang bisa dituangkan dengan Perda guna kepentingan masyarakat.

B. Adaptasi Awal Terkait Tugas Pokok, dan Fungsi(Tupoksi) DPRD

Berbeda dengan motivasi yang keberadaanya sudah terlihat dari sebelum terpilih menjadi anggota legislatif, adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan dimana anggota legislatif tersebut sudah terpilih. Penyesuaian berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan keinginan pribadi (Gerungan, 1991). Adaptasi itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan hidup. Salah satu dari syarat tersebut adalah syarat sosial dimana manusia membutuhkan hubungan untuk dapat melangsungkan keteraturan untuk tidak merasa dikucilkan, dapat belajar mengenai kebudayaan (Suparlan, 1993). Secara umum adaptasi adalah penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan yang baru atau asing untuk kelangsungan hidup. Dalam dunia kerja strategi untuk beradaptasinya dengan lingkungan pekerjaan.

Informan dalam studi ini adalah anggota dewan *non-incumbent*, mereka yang baru pertama kali menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Oleh karenanya mereka membutuhkan adaptasi dengan cepat dan baik terkait fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berikut adalah pemaparannya:

AT merasa tidak pernah mengalami hambatan dan kesulitan sejak awal masuk gedung dewan terkait tupoksinya.

"Ketika pertama kali masuk gedung dewan, saya tidak terlalu sulit beradaptasi menjadi anggota dewan terkait fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena paradigma eksekutifnya, paradigma gubernurnya membuka pintu untuk dialog secara terbuka membuka pintu-pintu. Di Jawa Timur pintunya ketemu semua. Karena itu bagi pendatang baru seperti saya tidak rumit untuk beradaptasi".

Begitu pun Gy, sama seperti AT tidak ada kesulitan dan mudah menyesuaikan diri terkait tupoksi yang dijalannya menjadi anggota dewan.

"Saya tidak merasa ada kesulitan terkait dengan tugas dan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan sebagai anggota dewan pertama kali di Indrapura. Menurut saya, yang lebih penting adalah membuat grand desain/blue print tentang APBD itu mau ke mana arahnya sesuai dengan harapan rakyat".

NS juga sependapat dengan Gy dan AT. Namun menurut NS, yang harus konsentrasi penuh dan belajar lebih ketika menjalankan fungsi anggaran.

"Saya tidak merasa ada kesulitan tatkala pertama kali menjadi anggota dewan tahun 2014. Saya enjoy saja. Terkait dengan fungsi barangkali hanya fungsi anggaran lah saya yang harus belajar lebih lagi. Karena kita kan bukan pelaku. Kita hanya mempelajari, sedangkan pelakunya kan SKPD. Hanya saja budgeting-budgeting kita kontrol terutama di sektor pertanian".

RA mengalami kesulitan pada dua bulan pertama menjadi anggota dewan.

"Di awal-awal saja saya kira ada sedikit kesulitan, karena dalam rangka adaptasi. Tapi dua bulan kemudian sudah

ready kok. Yang penting kitabanyak belajar dari siapa pun, tak terkecuali kepada mereka yang incumbent”.

Sama dengan RA, MZ pun tak butuh lama untuk segera paham terhadap tupoksi dewan. Hanya saja, ia ingin segera menyusul para seniornya *incumbent* yang sudah sangat hapal dengan berbagai macam regulasi yang melekat dengan fungsi dewan.

“Jadi hampir semua anggota DPRD ketika pertama kali pasti memiliki hambatan dalam konteks adaptasi dalam menjalankan ketiga fungsi itu. Tapi saya rasa ketika satu bulan kita berinteraksi, kita melihat, kita mendengar, saya kira bulan keduanya sudah bisa jalan normal. Saya mesti belajar banyak ketika masuk pertama kali menjadi anggota dewan. Tentang berapa lama penyesuaiannya, saya pikir selama kita mau membaca, prosesnya akan berjalan dengan cepat. Jika sampai hari ini saya bilang belum seperti para senior yang sudah dengan lancar membaca teks kemudian menyebutkan perundang-undangan dan sebagainya, tentang dasar hukum dan sebagainya, tapi saya terus belajar. Saya terus mengejar mereka. Yang penting itu kemauan sih Pak. Kemauan kita untuk berkembang. Karena literturnya sudah disediakan. Tinggal kita mau membaca apa tidak”.

ZL pun menyatakan butuh waktu sekitar dua bulan dalam menyesuaikan diri terkait tupoksinya. Sama persis yang dikatakan informan sebelumnya. Hanya ZL menambahkan bahwa kesulitan pertama justru pada saat ia membangun konfigurasi dan komunikasi. Karena menurutnya, anggota

legislatif tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa berjalan sendiri karena keputusan legislatif adalah keputusan bersama. Butuh

proses adaptasi dengan anggota dewan lainnya, termasuk keinginan bagaimana menyamakan visi, melakukan misi bersama, menyamakan tujuan, dan persepsi.

"Sedikit banyak ada lah kesulitan ketika kita baru terjun menjadi anggota dewan terkait fungsi legislasi, anggaran, dan kontrol. Tapi dengan terus belajar, kita bisa meminimalisir lah kesulitan itu. Kaitan dengan fungsi budgeting ada tertuang dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran, red.). Terkait dengan fungsi kontrol sudah ada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran, red) nya. Kesulitan pertama ketika masuk menjadi anggota dewan adalah bagaimana kita membangun konfigurasi dan komunikasi. Karena sejujurnya anggota legislatif ini tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai anggota legislatif harus bersama-sama Pak, tidak bisa berjalan sendiri karena keputusan legislatif ini adalah keputusan bersama. Butuh proses adaptasi dengan kawan, termasuk keinginan bagaimana menyamakan visi, melakukan misi bersama ini, dalam menyamakan tujuan, dan persepsi. Itu kesulitan di awal-awal. Karena kita sudah faham tupoksinya waktu di kabupaten dulu, maka tidak butuh lama untuk memahami tupoksinya dewan. Dua bulan saya sudah bisa membangun komunikasi dengan semua kawan di sini".

HW pun mengaku sudah siap ketika awal menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sama seperti informan yang lain tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikan tupoksinya. Bekal kesiapan itu, justru ia dapatkan jauh hari sebelum ia menjadi anggota dewan.

"Ya pertama saya selama lima tahun sebagai Ketua Umum DPW PKS Jawa Timur, otomatis sehari-harinya salah satunya mengelola Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur yang merupakan

*kepanjangan tangan kami di struktur DPW PKS Jawa Timur
sehingga learning by doing, akhirnya tahu apa*

saja, tugas dan pokok fungsi anggota dewan termasuk fungsi legislasi, pengawasan, maupun budgeting. Ya pada prinsipnya ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus, kenapa? Karena begitu kami dilantik, saat itu juga kami harus berfungsi. Sehingga tidak ada alokasi waktu yang lama bagi kami untuk beradaptasi. Karena itulah yang saya sampaikan tadi ketika April Pemilu, kemudian sekitar tiga atau empat hari setelahnya itu dapat kepastian menjadi salah satu wakil rakyat di Jawa Timur Dapil I, walaupun pelantikannya masih Agustus, waktu-waktu sebelum itulah yang saya pergunakan sebaik-baiknya dengan cara seperti yang saya sebut tadi di atas. Sehingga begitu dilantik, ndak lama setelah itu ada bimbingan teknis resmi dari DPRD yang diselenggarakan oleh DPRD Jawa Timur, itu sifatnya hanya tambahan saja dari apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Sehingga ketika selesai Bimtek, ya kami sudah harus ekspert sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan tugas di hari pertama setelah bimbingan teknis tersebut. Nah salah satunya yang saya lakukan itu tadi, membaca PA dan PU Fraksi PKS atau pun PA PU dari fraksi yang lain yang ada di dalam arsip sekwan DPRD Jawa Timur, nah itu yang saya kaji dan saya pelajari saya diskusikan dengan beberapa anggota DPRD Jawa Timur, fraksi PKS saat itu”.

Seperti informan lainnya, RO pun butuh waktu tak lama untuk menyesuaikan dengan tupoksinya.

“Pertama kali saya menjadi anggota dewan di Indrapura ini saya butuh penyesuaian namun tidakterlalu lama.Tidak ada yang sulit untuk beradaptasi dengan ketiga fungsi dewan”.

MS menyatakan tidak ada kesulitan ketika pertama kali masuk Gedung Indrapura. Karena ia sudah pernah dua periode menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Namun ia

pun merasakan hal yang sama dengan informan lain, ketika pertama kali menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pasuruan. Tetapi ia sangat terbantuan karena di partainya (Nasdem) ada sekolah kader yang materinya di antaranya; tentang keorganisasian, pemerintahan, dan manajemen. Di dalam materi pemerintahan ini salah satunya adalah tupoksinya DPRD.

"Karena saya pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, maka saya tidak pernah merasa kesulitan. Langsung dapat beradaptasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan dan Komisi A. Ketika dulu pertama kali saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, ya di awal-awal itulah sebagai seorang politisi anyaran ya istilahnya itu, saya harus beradaptasi dan mempelajari selama sekian bulan, untuk memahami betul tentang aturan-aturan yang terkait dengan tugas pokok, dan terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di DPRD. Sehingga saya butuh antara dua bulan lah mempelajari betul semua aturan- aturan yang ada dan setelah itu running well. Saya lihat partai-partai belum optimal di dalam mempersiapkan kadernya, untuk terjun ke dunia politik. Nah jika di Nasdem, itu memang ada, namanya sekolah kader. Sekolah kader jauh-jauh sudah diajarkan, diajarkan tentang sistem, sistem pemerintahan yang ada. Semua kader Nasdem diberikan sekolah kader. Materi sekolah kader itu tentang keorganisasian, pemerintahan, kemudian tentang manajemen. Nah pemerintahan ini salah satunya adalah tupoksinya DPRD. Di Nasdem, di awal-awal selama tiga hari, diberikan materi tentang tupoksi DPRD, tentang hubungan dengan pemerintah, tentang teknik lobiying, tentang per- musyawarahan, dan macem-macem. Menurut saya yang paling sulit dijalani adalah fungsi pengawa- san. Pengawasan ini kan membandingkan antara yang baik dan yang tidak baik.

Membandingkan antara yang sesuai dengan aturan dan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah berarti kita harus

tahu yang betul, yang baik, yang sesuai dengan aturan, baru kemudian melakukan pengawasan. Jika kita tidak tahu ini maka kita tidak akan bisa melakukan pengawasan. Misalnya kita tidak faham tentang bangunan, ya apa yang akan kita awasi. Dan dari ketiga fungsi ini, yang paling bobot yang harus dikuasai anggota dewan adalah fungsi legislasi. Karena di sini fungsinya adalah membuat peraturan daerah. Semuanya itu kan berawal berakar dari situ kan? Termasuk penyusunan APBD itu kan cuma bagian dari peraturan daerah”.

Dari data studi tentang adaptasi awal menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menyesuaikan diri terkait fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, hanya membutuhkan waktu sekitar dua bulanan. Namun tingkat kesulitan terkait adaptasi pada fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, masing-masing anggota dewan menjawab tidak sama.

Beberapa alasan kenapa mereka mampu cepat beradaptasi dengan tupoksinya, diantaranya; paradigma eksekutifnya membuka pintu untuk dialog secara terbuka dengan legislatif, para senior anggota dewan *incumbent* mau diajak *sharing* tentang fungsi kedewanan, persiapan belajar dan mempelajari berbagai tupoksi kedewanan dilakukan sebelum menjadi anggota dewan, pengalaman menjadi anggota dewan di kabupaten, serta ada sekolah kader di partainya sebelum masuk menjadi anggota dewan.

Dari hasil temuan tersebut terkait tentang penyesuaian kompetensi anggota dewan pada tupoksinya ketika pertama kali menjadi anggota dewan, Thoha (2002) menyatakan bahwa

karena singkatnya tenggat waktu penunjukan anggota DPRD. Sering kali para anggota DPRD belum dibekali materi tentang tupoksi kedewanan, hukum, dan pengetahuan masyarakat sebelum dilantik.

Berdasarkan hasil studi di atas, ditemukan tentang adaptasi awal menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menyesuaikan diri terkait fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan yang dikelompokkan dalam kategori tabel di bawah ini:

Tabel 14
Adaptasi Awal Terkait Tupoksi

No.	Adaptasi awal menjadi anggota legislatif terkait Tupoksinya
01.	Masing-masing anggota legislatif memiliki tingkat kesulitan yang berbeda terkait adaptasi awal pada fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan.
02.	Rata-rata hanya membutuhkan waktu sekitar dua bulan di awal bertugas untuk beradaptasi dengan tupoksinya.
03.	Beberapa alasan kenapa mereka mampu cepat beradaptasi dengan tupoksinya, diantaranya karena; paradigma eksklusifnya membuka pintu untuk dialog secara terbuka dengan legislatif, para senior anggota dewan <i>incumbent</i> mau diajak <i>sharing</i> tentang fungsi kedewanan, persiapan belajar dan mempelajari berbagai tupoksi kedewanan dilakukan sebelum menjadi anggota dewan, pengalaman menjadi anggota dewan di kabupaten, serta ada sekolah kader di partainya sebelum masuk menjadi anggota dewan.

C. Harapan (Solusi) Anggota DPRD

Dalam kelancaran pelaksanaan tupoksi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, termasuk dalam mendukung pembelajaran mandiri, semua informan menyatakan harapan yang sama. Yaitu pemerintah sebaiknya memfasilitasi staf ahli dan staf pribadi kepada masing-masing anggota legislatif daerah. Karena keberadaan mereka sangat diperlukan oleh anggota dewan untuk membantu kelancaran dan percepatan melaksanakan fungsi dewan.

Berikut ini, harapan-harapan yang disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terkait kebutuhan untuk mendukung tupoksinya.

AT berharap sekali ada staf pribadi yang dibiayai pemerintah untuk mampu mendukung kinerjanya sebagai anggota dewan.

"Saya berharap setiap anggota dewan memiliki staf pribadi yang difasilitasi oleh pemerintah. Minimal satu dewan difasilitasi satu staf".

MZ pun mengamini AT. Ia beralasan, anggota dewan berasal dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu, yang notabene tidak semuanya dapat menguasai materi di dalam tupoksinya. Makanya ia butuh staf pribadi yang dibiayai pemerintah minimal satu atau dua staf. Apalagi Jawa Timur adalah sebuah provinsi dengan daerah yang luas dengan mengelola

belanja 23 triliun rupiah yang dijalankan berdasarkan kehendak rakyat.

"Menurut saya secara jujur seharusnya anggota DPRD oleh pemerintah dibiayai staf. Jadi kita bisa mendapatkan panduan dari para staf karena kami datang dari latar belakang yang berbeda. Tentunya seperti latar belakang keluarga saya adalah pendidikan pesantren. Latar belakang pendidikan saya adalah MSDM. Tentunya saya tidak menguasai ilmu tentang yang dalam satu sisi misalnya tentang ekonomi secara mendetail. Saya tidak menguasai ilmu pertambangan secara mendetail. Mungkin ada beberapa teman lain yang datang dari latar belakang yang berbeda dan mungkin mereka tidak menguasai tipikal pendidikan secara detail. Sehingga sebenarnya staf ini sangat diperlukan. Jika boleh saya mengkritik sebenarnya, atau memberi saran tepatnya, seharusnya negara membiayai minimal satu atau dua staf. Sehingga kami bisa mencari staf dan yang digaji dengan uang negara tentunya dan dengan angka yang sangat baik, sehingga mendapatkan staf yang berkualitas. Sementara ini saya pribadi hanya dapat memberi gaji dengan hanya 2 atau 3 juta, staf yang saya bayar ya staf yang first graduate yang mungkin pengalamannya kurang. Jika orang yang sudah senior yang mungkin tidak mau lah dengan gaji 2 atau 3 juta. Minimal setiap anggota di sini punya satu. Saya punya satu yang biasa membantu saya tergantung order yang saya butuhkan. Misalnya saya akan membahas soal pendidikan, biasanya saya minta tolong untuk dicarikan update dan terakhir tentang perundang-undangan, tentang Permennya, Pergubnya dan sebagainya, dengan regulasi sebelumnya. Kami merasa kualitas staf pribadi kami, masih jauh kualitasnya dengan yang kami harapkan. Karena kami di sini mengelola 20 sekian triliun di Jawa Timur. Dan 23 triliun itu dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Kehendak rakyat itu diwakili oleh 100 orang yang ada di sini. Dan bagaimana perkembangan arah Jawa Timur, mau atau tidak mau sedikit banyak pasti tergantung pada kami. Jika kami tidak memiliki sumber daya yang cukup, sumber

data yang cukup, maka ya sebenarnya kami berjalan tanpa arah”.

HW senada juga dengan AT dan MZ, dengan membutuhkan satu staf tenaga ahli untuk setiap anggota dewan. Tenaga ahli yang menguasai kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tupoksinya di komisi. Karena *backgroundnya* masing-masing anggota dewan tidak sama, baik kompetensi ilmiah, pengalaman organisasi, serta pengalaman bekerjanya. Itu tidak cukup untuk membawahi mitra SKPD di Pemprov Jawa Timur. Di samping itu, di DPR pusat juga sudah disediakan staf tenaga ahli yang dibiayai oleh pemerintah.

"Terkait hambatan, yang pertama tentunya jika kita mau melakukan fungsi yang tiga itu dengan ideal, kita harusnya difasilitasi juga oleh negara dengan anggaran untuk tenaga-tenaga ahli seperti teman-teman kami di DPR RI. Kenapa? Karena kita sangat membutuhkan detail data, untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan. Nah dalam hal ini sama sekali tidak ada. Hanya ada apa namanya staf komisi yang itu biasanya saya mintai bantuannya untuk menghimpun data baik dari mitra SKPD maupun data waktu kita kunjungan kerja di UPTD dan di kementerian. Nah, data-data itu yang kemudian saya olah sendiri sedemikian rupa untuk menunjang keperluan saya di dalam melaksanakan fungsi sebagai anggota DPRD. Nah ini yang sangat membedakan dengan teman-teman di DPR RI. Padahal kami melakukan fungsi yang sama ya, tugas yang sama, yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Kedua, kami ini backgroundnya baik apakah itu kompetensi ilmiah kami, atau pun pengalaman organisasi kami, pengalaman bekerja kami, itu tidak cukup untuk membawahi mitra SKPD kami. Misalkan jika Komisi A, itu lebih dari 20 mitra ya. Jika saya di Komis D hanya 8 mitra, tetapi diversifikasi kompetensi yang dibutuhkan itu juga lumayan luas. Ada ESDM di situ ada BLH di situ, ada Biro Administrasi

Pembangunan di situ, selain Dinas PU. Nah ini kan, apa namanya, sesuatu yang menjadi tantangan bagi kami, karena itulah sebenarnya diperlukan ada satu tenaga ahli yang dibiayai oleh negara. Jika tidak melekat pada masing-masing kami, sehingga butuh seratus tenaga ahli, paling tidak melekat pada fraksi. Sekarang ini fraksi mengeluarkan biaya sendiri TA-TA (tenaga ahli, red.) yang kami perbantukan untuk melakukan diskusi-diskusi di Fraksi PKS DPRD Jawa Timur. Selama ini Sekwan memfasilitasi yang hanya ada Bimtek yang satu tahun itu, hanya tiga kali sampai empat kali. Dan belum tentu acara atau pun menu yang disajikan materi yang disajikan itu sedang kami perlukan. Nah itu masalahnya. Yang sebenarnya menurut saya yang paling dibutuhkan adalah rekan-rekan anggota DPRD adalah tenaga ahli. Tenaga ahli yang tentunya menguasai kompetensi yang diperlukannya untuk melakukan tupoksinya di komisi tersebut. Jika PKS saya pikir, mungkin salah satu partai yang apa namanya, sangat perhatian di dalam program meningkatkan kinerja seluruh anggota DPRDnya bukan hanya kami di DPRD Jawa Timur. Saya beri contoh misalkan kami punya bidang kaderisasi, kami juga punya bidang polhukam, kami juga punya bidang kemenangan pemilu, yang ketiganya bersinergi salah satu programnya adalah meningkatkan kinerja kami anggota DPRD kab/kota se Jawa Timur dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan yang lainnya seperti Gy, NS, RA, ZL, RO, MS terkait dengan harapannya untuk mendukung fungsi dewan. Gy politisi PDI Perjuangan asal Pacitan berharap ada staf tenaga ahli pribadi yang dapat mendampinginya.

"Paling tidak ada staf tenaga ahli yang mendampingi di ruang kerja di kantor dewan. Karena jika seperti sekarang sangat repot bekerja sendiri".

Begitu pun NS dengan penuh harap, agar difasilitasi oleh pemerintah, setiap satu anggota dewan minimal satu staf tenaga ahli.

"Jika itu terlaksana akan sangat memudahkan kita untuk menjalankan tupoksinya. Karena banyak pencarian data yang butuh tenaga ahli untuk mencarikannya".

RA, anggota Fraksi Partai Demokrat dan anggota Badan Musyawarah (Banmus) dan wakil ketua komisi C ini juga menyampaikan hal yang sama.

"Sebetulnya ini angan-angan lama. Sudah lama saya mengharapkan pemerintah memfasilitasi minimal satu staf tenaga ahli untuk mendampingi satu anggota dewan untuk membantu kinerjanya".

Sedangkan ZL pria kelahiran Sidoarjo 05 September 1976 anggota Badan Musyawarah (Banmus) mengatakan bahwa salah satu untuk mendukung fungsi dewan dalam memaksimalkan kinerjanya adalah dengan memilikinya tenaga ahli.

"Kita ini memiliki keterbatasan keahlian dan tenaga. Akan sangat arif dan bijaksana, tatkala pemerintah dapat memfasilitasi anggota dewan dengan minimal satu staf pendamping sebagai tenaga ahli".

RO yang menjabat sebagai bendahara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jawa Timur mengatakan:

"Harapannya satu dewan memiliki satu tenaga ahli".

MS, ketua Fraksi Nasdem-Hanura dan mantan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan periode 2003-2007 ini pun menegaskan hal yang sama.

"Semoga ke depannya setiap anggota dewan difasilitasi pemerintah staf ahli. Karena ini sangat membantu kelancaran kinerja dewan".

Dari data studi pada harapan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terkait tupoksinya, informan berharap disiapkan minimal satu staf ahli pribadi yang menguasai kompetensi yang diperlukannya untuk melakukan tupoksinya yang dibiayai oleh pemerintah. Karena selama ini staf ahli yang ada hanya untuk melayani fraksi maupun komisi, sehingga kinerjanya kurang maksimal terhadap individual anggota dewan. Dengan anggota dewan yang berasal dari background berbagai latar belakang dan disiplin ilmu, baik kompetensi ilmiah, pengalaman organisasi, serta pengalaman bekerjanya yang notabene tidak semuanya dapat menguasai materi di dalam tupoksinya. Dan itu tidak cukup untuk membawahi mitra SKPD di Pemprov Jawa Timur. Apalagi Jawa Timur adalah sebuah provinsi dengan daerah yang luas dengan mengelola belanja 23 triliun rupiah yang dijalankan

berdasarkan kehendak rakyat. Dan bagaimanapun perkembangan arah Jawa Timur, mau atau tidak mau sedikit

banyak pasti tergantung pada anggota dewan. Jika anggota dewan tidak memiliki sumber daya yang cukup, sumber data yang cukup, maka dikatakannya sebagai berjalan tanpa arah. Karena masyarakat tentu sangat membutuhkan detail data, untuk melakukan ⁸⁷ baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan. Di samping itu, di DPR pusat juga sudah disediakan staf tenaga ahli yang dibiayai oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil studi di atas, ditemukan tentang harapan yang disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terkait kebutuhan untuk mendukung tupoksinya yang dikelompokkan dalam kategori tabel di bawah ini:

Tabel 15
Harapan Terkait Tupoksi

No.	Harapan anggota legislatif terkait Tupoksinya
01.	Minimal satu anggota dewan memiliki satu staf ahli pribadi yang dibiayai oleh pemerintah untuk membantu dalam pelaksanaan tupoksinya. Karena selama ini staf ahli yang ada hanya untuk melayani fraksi maupun komisi, sehingga kinerjanya kurang maksimal untuk keperluan anggota dewan secara individu. Anggota dewan yang berasal dari <i>background</i> disiplin ilmu, kompetensi ilmiah, pengalaman organisasi, serta pengalaman bekerja-nya, yang notabene tidak semuanya dapat menguasai semua materi di dalam tupoksinya. Apalagi Jawa Timur adalah sebuah provinsi dengan daerah yang luas dengan mengelola belanja 23 triliun rupiah. Dan bagaimanapun perkembangan arah Jawa Timur, mau atau tidak mau sedikit banyak tergantung pada kinerja anggota dewan.

No.	Harapan anggota legislatif terkait Tupoksinya
	Jika anggota dewan tidak memiliki sumber daya yang cukup, sumber data yang cukup, maka dikatakannya sebagai berjalan tanpa arah. Karena anggota dewan sangat membutuhkan detail data, untuk melakukan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan.

Pada dimensi motivasi, adaptasi, dan harapan anggota DPRD, hasil studi menjelaskan bahwa motivasi menjadi anggota DPRD, adaptasi awal terkait fungsi DPRD, dan harapan anggota DPRD Jawa Timur terkait tupoksinya, tergambar dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Anggota legislatif memiliki motivasi yang beragam menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kesamaannya, yaitu dengan otoritasnya ingin mengabdikan kepada masyarakat melalui kompetensi yang mereka miliki. Dengan otoritasnya, ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan banyak kebijakan yang bisa dituangkan melalui Perda guna kepentingan masyarakat.
2. Dalam menyesuaikan diri terkait fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, membutuhkan rata-rata sekitar dua bulan. Namun tingkat kesulitan terkait adaptasi pada fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, masing-masing anggota dewan menjawab tidak sama. Beberapa alasan kenapa mereka mampu cepat beradaptasi dengan tupoksinya, diantaranya karena; paradigma eksekutifnya membuka pintu untuk dialog secara terbuka dengan legislatif, para senior

anggota dewan *incumbent* mau diajak *sharring* tentang fungsi kedewanan, kesiapan belajar jauh hari sebelum menjadi anggota dewan, pengalaman menjadi anggota dewan di kabupaten, serta ada sekolah kader di partainya sebelum masuk menjadi anggota dewan.

3. Harapan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terkait tupoksinya, minimal ada satu staf ahli pribadi yang dibiayai oleh pemerintah untuk membantu melayani anggota dewan dalam melaksanakan tupoksinya. Karena selama ini staf ahli yang ada hanya untuk melayani fraksi maupun komisi, sehingga kinerjanya kurang maksimal terhadap individual anggota dewan. Dengan anggota dewan yang berasal dari berbagai *background* dan disiplin ilmu, baik kompetensi ilmiah, pengalaman organisasi, serta pengalaman bekerjanya yang notabene tidak dapat menguasai semua materi di dalam tupoksinya. Jika anggota dewan tidak memiliki sumber daya yang cukup, sumber data yang cukup, maka dikatakannya sebagai berjalan tanpa arah.



BAB VII

PENUTUP

Pembelajaran mandiri merupakan hal yang sangat penting bagi para anggota legislatif terutama dalam rangka meningkatkan kompetensinya pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta memahami peranan sosialnya sehari-hari. Hal ini karena melihat fakta di lapangan tentang minimnya Parpol maupun Sekretariat DPR/DPRD dalam menyelenggarakan Diklat/Bimtek/³⁷ *workshop*. Dalam kaitannya dengan objek studi pada buku ⁷³ *ini* menunjukkan bahwa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki konsep diri (*the self-concept*) dalam pembelajaran secara mandiri. Mereka mampu mengarahkan ⁷³ *dirinya sendiri* (*self-direction*) dan menentukan *dirinya sendiri* (*self-determination*) dalam melakukan pembelajaran mandiri.

Kesadaran diri dan inisiatif para anggota legislatif dalam proses pembelajaran mandiri pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pengalaman menjadi anggota dewan; pengalaman organisasi/partai politik; pengalaman pendidikan

formal; dan kesiapan belajar (*readiness to learn*) untuk meng-up grade dan meng-up date diri.

Sementara itu, ada banyak sumber belajar para anggota legislatif baik dari sesama manusia yang terkait maupun dari sumber-sumber lain yang dipandang relevan, seperti halnya LSM, media elektronik dan cetak, diklat/pelatihan Bimtek, kasus-kasus yang datang dari konstituen, dan karya ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Dari banyak-nya sumber belajar tersebut, orientasi belajar (*orientation to learning*) yang digunakan oleh anggota legislatif berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (*problem centered orientation*).

Anggota legislatif pada umumnya memiliki motivasi yang beragam untuk duduk menjadi wakil rakyat. Kesamaannya yaitu dengan otoritasnya ingin mengabdikan kepada masyarakat melalui kompetensi yang mereka miliki. Sementara itu, setelah pelantikan menjadi wakil rakyat, umumnya anggota legislatif membutuhkan waktu paling lama dua bulan untuk menyesuaikan diri terkait tugas dan fungsinya. Namun demikian, guna mempercepat dan menyukseskan proses pembelajaran mandiri, anggota legislatif memiliki harapan, yaitu minimal ada satu staf ahli pribadi yang dibiayai oleh pemerintah untuk membantu melayani anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya. Karena selama ini staf ahli yang ada hanya untuk melayani fraksi maupun komisi, sehingga kinerjanya kurang maksimal terhadap individual anggota dewan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L.W dan Krathwohl, D.R, 2010. *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen (Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A. Kathleen, Richard E Mayer, Pintrich R Paul, Rath James, Wiftrick C Marlian, 2001. *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assesing. A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objective*. Abridged Edition. New York : Logman Inc.
- Baiyin, Y, 2003. *Toward a Holistic Theory of Knowledge and Adult Learning*. Human Resource Development Review. 2, (2), 106-129
- Bandura, A, 1986. *Social Fondation of Thought and Action: A Social Cognitif Theory*. New jersey: Prentice Hall, Inc.
- Bonham, L. A. (1989). *Self-directed orientation toward learning: A learning style?* In H. B. Long & Associates (Eds.), *SDL: Emerging theory and practice* (pp. 13- 42). Norman, OK: Oklahoma Research Center for Continuing Professional and Higher Education, University of Oklahoma.
- Botkin, J.W., 1984. *No Limits To Learning: Bridging The Gaps*. Oxford Pergamon Press.
- Candy PC, 1991. *Self-direction for life-long learning: a comprehensive guide to theory and practice*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Coles, Edwin K, Townsend, 1977. *Adult Education in Developing Countries*. Pergamon Press Ltd., Great Britain, pp 1-16

- Darkenwald, Gordon D., and Meriam, Sharan B. (1982) *Adult Education Foundations of Practice*. New York: Harper and Row Publisher.
- Delors, J., 1996. *Learning: The treasure Within*. Paris: Unesco.
- Elias, J.L., 1980. *Philosophical Foundation of Adult Education*. Malabar Florida.
- Freire. P., 1970. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: the Searbury Press.
- Gage, N.L & Berliner, David C. (1998). *Educational Psychology 6th Edition*. Boston New York: Houghton Mifflin Company.
- Gibbons, Maurice, 2002. *The Self Directed Learning Handbook Challenging Adolescent Student to Excel*. San Fransisco: Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Gross, R., 1991. *Peak Learning: How to Create Your Own Lifelong Education Program for Personal Enjoyment and Profesional Success*. New York. Putnam.
- Guglielmino, L. M., & Guglielmino, P. J., 1991. *Expanding your readiness for self-directed learning*. Don Mills, Ontario: Organization Design and Development Inc.
- Hiemstra, R., (1994), *Self-directed learning*. In T. Husen & T. N. Postlethwaite (Eds.), *The International Encyclopedia of Education (second edition)*, Oxford: Pergamon Press.
<http://home.twny.rr.com/hiemstra/sdlhdbk.html>
(diakses 7 Juli 2017)
- Hoxeng, J., dkk., 1975. *Nonformal Education in Equador: An Approach To Non formal Education: Massachusetts*. Center For International Education, School of Education, University of Massachusetts.
- Hurlock, E.B. 1999. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih bahasa: Istiwidayati & Soedjarwo. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Inggalls, J., 1973. *A Trainer Guide To Andragogy It is Concept, Experience and Application*. Washington Departemen of Health Education and Welfare.
- Jarvis, Peter. *Adult and Conditioning Education: Theory and Practice*. London: Croom Helm, 1992.

Kambuaya, O., 2012. *27 Kunci Sukses Meningkatkan Kapasitas sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Sistem*

- Pemerintahan NKRI. Penerbit CV. Aswaja Pressindo Yogyakarta.
- Knowles, M., 1950. *Informal Adult Education: A Guide For Administrator, Leader and Teachers*. New York, Association Press.
- , 1970. *Self Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers*. New York: Association Press.
- , 1975. *Self-directed learning: a guide for learners and teachers*. New York: Association Press.
- , 1984. *The Adult Learner: A Neglected Species (3rd Ed.)*. Houston, TX: Gulf Publishing.
- , 1984. *Andragogy in Action*. San Francisco: Jossey-Bass.
- , 1989. *The Making of an Adult Educator*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Knowles, M., & Associates. (1984). *Andragogy in Action. Applying modern principles of adult education*. San Francisco: Jossey Bass.
- Knowles MS, Erickson M., 1990. *Self-directed learning: A guide for learners and teachers*. New York: Cambridge Book Company.
- Moore, M G., dan Kearsley, G., 1996. *Distance Education: A Systems View*. Belmont, C A: Wadsworth Publishing Company.
- Morgan, Barton, et al., (1976). *Methods in adult education*. Danville, Illinois: The Interstate Printers & Publishers, Inc.
- Novak, J. D. and Gowin, D. B., 1984. *Learning How to Learn*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rogers, J., 1973. *Adult Learning*. Barret-Kohler Published, Inc. San Fransisco.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Republik Indonesia. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

- Sabbaghian, Z., 1980. *Adult self-directedness and self-concept: An exploration of relationship.*, Iowa State University, 1979. *Dissertation Abstract International*, 40, 3701-A.
- Saraka, 2001. *Model Belajar Swarah dalam Pengembangan Sikap Mental Wiraswasta*. Bandung, PPS, UPI.
- Sharan, B. Merriam (editor), 2001. *The New Uptade on Adult Learning Theory*. San Francisco. Jossey Bass.
- Slameto, 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Srinivasan, L., 1977. *Perspectives on Non Formal Adult Learning: Functional Education For Individual, Community and National Development*, Connecticut Prentice Hall. New York: Association Press.
- Sudjana, D., 2000. *Pendidikan Luar Sekolah, Sejarah, Azas*. Bandung Falah Production.
- Suprijanto, 2007. *Pendidikan Orang Dewasa dari Teori Hingga Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Swanson, A., Richard & Elwood, F., Holton III, 2009. *Foundations Of Human Resources Development*. Berret – Kohler Publisher San Francisco.
- Thoha, M., (2002). Efektifitas penyelenggaraan fungsi DPRD berdasarkan pendekatan kompetensi. *Makalah Diskusi Panel "Profil DPRD Masa Depan"*. LAN Jakarta.
- Unesco, 1988. *Continuing education: New policies and Directions*.
- Yang, Baiyin, Karen E. Watkins, and Victoria J. Marsick, 2002. The Construct of the Learning Organization: Dimensions, Measurement, and Validation. *Human Resource Development Quarterly Journal* Vol. 15 no. 1 p. 31-55



PROFIL PENULIS



AGUS WAHYUDI, SH. MSI adalah Widya Iswara Ahli Utama pada Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Provinsi Jawa Timur (BPSDM PROV. JATIM) dengan Pangkat Pembina Utama Madya / IVD.

DATA RIWAYAT PENDIDIKAN TEKNIS/STRUKTURAL

No	Pendidikan>Nama Diklat	Lembaga Penyelenggara	Tahun Lulus
1.	PSD	Diklat Prov Jatim	1989
2.	Bintek Penyusunan Per – UU-an	Diklat Prov Jatim	1989
3.	SEPALA	Diklat Prov Jatim	1995
4.	SPAMA	Diklat Prov Jatim	1997
5.	SPAMEN	Diklat Prov Jatim	2005
6.	Kursus Bahasa Inggris	Diklat Kota Kediri	2010
7.	Pelatihan Perencanaan Pembangunan	Diklat Kota Kediri	2010
8.	Pelatihan AKIP	Diklat Kota Kediri	2010
9.	Pelatihan Potensi Peningkatan Pendapatan Daerah	Diklat Kota Kediri	2010
10.	Pelatihan Etika Pem& Pel Masyarakat	Diklat Kota Kediri	2010
11.	Pelatihan Manajemen dan Pengembangan SDM	Diklat Kota Kediri	2010

DATA RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

No	Jabatan Struktural / Fungsional	TMT
1.	Kepala Kantor Ketenaga Kerja di Kediri	2001 s/d 2004
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kediri	2005 s/d 2008
3.	Sekertaris DPRD Kota Kediri	2008 s/d 2009
4.	Kepala Disbudparpora Kota Kediri	2009 s/d 2010
5.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kediri	2010 s/d 2010
6.	Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Kediri	2010 s/d 2011
7.	Sekertaris Daerah Kota Kediri	2011 s/d 2014
8.	Staf Ahli Bidang Pembangunan Provinsi Jawa Timur	2014 s/d 2016
9.	Kepala Dinas PMD	2016 s/d 2018
10.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur	2019 s/d 2020

Menjadi anggota legislatif merupakan impian bagi banyak orang. Hal ini terbukti dari fakta banyaknya anggota masyarakat yang saling berlomba-lomba dalam mengikuti kontestasi politik, terutama dalam momen pemilihan umum (pemilu). Dari pemilu ke pemilu, data menunjukkan bahwa semakin banyak anggota masyarakat yang berminat untuk ikut terlibat secara langsung dalam proses menjadi anggota legislatif dari mulai seleksi di tingkat partai.

Buku ini merupakan hasil kajian penelitian terhadap perilaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan diri (*self-development*) mereka. Seperti kita ketahui bersama bahwa anggota legislatif di era reformasi sekarang ini dituntut untuk lebih memahami aspirasi masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Dengan 'belajar mandiri', baik melalui literatur dan referensi yang ada, mereka juga melakukan teknik *mentoring* kepada senior mereka yang terpilih pada periode sebelumnya.

Self Learning

Sebagai Embrio
Pengembangan Diri
Anggota Legislatif



Penerbit Desapublit (CV. BUDI UTAMA)
Jl. Kukuwang No. 8/2 Yogyakarta 55261
Telp/Fax : (0274) 4533432
Anggota IKAPI (075/DH/2013)
✉ info@desapublit.co.id
📱 Penerbit Desapublit
📧 desapublit@gmail.com
🌐 www.penerbitdesapublit.com



Kategori :

8_E-book Self Learning

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

rismajayanti6.blogspot.com

Internet Source

2%

2

rinitarosalinda.blogspot.com

Internet Source

2%

3

Submitted to University of Muhammadiyah
Malang

Student Paper

2%

4

www.siafif.com

Internet Source

1%

5

www.scienceedujournal.org

Internet Source

1%

6

Udan Kusmawan. "KESIAPAN BELAJAR
MANDIRI GURU SEKOLAH DASAR: STUDI
KASUS PADA PROGRAM STUDI PGSD PADA
FKIP UNIVERSITAS TERBUKA", Jurnal
Pendidikan dan Kebudayaan, 2017

Publication

1%

7

dprd.jatimprov.go.id

Internet Source

1%

8

jos.unsoed.ac.id

Internet Source

1%

9	annissamailinawati.blogspot.com Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
11	mafiadoc.com Internet Source	1 %
12	nbasis.wordpress.com Internet Source	1 %
13	gatotsudjito.wordpress.com Internet Source	1 %
14	kominfo.jatimprov.go.id Internet Source	<1 %
15	pustakaazham.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
17	kpmbwi.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Student Paper	<1 %
19	sipeg.unj.ac.id Internet Source	<1 %
20	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %

jurnal.unsyiah.ac.id

21

Internet Source

<1 %

22

jurmafis.untan.ac.id

Internet Source

<1 %

23

managementaccess.blogspot.com

Internet Source

<1 %

24

riocristianto.blogspot.com

Internet Source

<1 %

25

journals.unihaz.ac.id

Internet Source

<1 %

26

agussambeng.blogspot.com

Internet Source

<1 %

27

aishaazalia.blogspot.com

Internet Source

<1 %

28

files.osf.io

Internet Source

<1 %

29

upithfauziyah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

30

ejournal.iainkendari.ac.id

Internet Source

<1 %

31

indeks-inovasi.brin.go.id

Internet Source

<1 %

32

imammr.wordpress.com

Internet Source

<1 %

33

Evsa Wulan Suri. "PROFESIONALISME
ANGGOTA DPRD PROVINSI BENGKULU

<1 %

DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI", MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial
Dan Politik, 2018

Publication

34	repository.penerbitwidina.com Internet Source	<1 %
35	Submitted to Canterbury Christ Church University College Student Paper	<1 %
36	jurnal.umrah.ac.id Internet Source	<1 %
37	journal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
38	peraturan.go.id Internet Source	<1 %
39	restoe-mustika.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	journals.ums.ac.id Internet Source	<1 %
41	www.pdf-archive.com Internet Source	<1 %
42	firagadismanis.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	downloadmakalahgratis.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	scholarworks.montana.edu Internet Source	<1 %

45

lppm.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

46

Jamiatul Hamidah, Akhmad Syakir.
"Implementasi Pendekatan Andragogi
Spiritual dalam Meningkatkan Motivasi
Belajar Mandiri Mahasiswa pada Program
Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP
Universitas Muhammadiyah Banjarmasin",
Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan
Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing, 2021

Publication

<1 %

47

rickypuspito.blogspot.com

Internet Source

<1 %

48

[Submitted to Staffordshire University](#)

Student Paper

<1 %

49

www.readbag.com

Internet Source

<1 %

50

[Submitted to University of Northampton](#)

Student Paper

<1 %

51

akurat.co

Internet Source

<1 %

52

repository.upi.edu

Internet Source

<1 %

53

www.dprdsulsel.go.id

Internet Source

<1 %

54

yunitasarimanalu.wordpress.com

Internet Source

<1 %

55	"Encyclopedia of the Sciences of Learning", Springer Science and Business Media LLC, 2012 Publication	<1 %
56	aristorahadi.wordpress.com Internet Source	<1 %
57	kabmmu.blogspot.com Internet Source	<1 %
58	Rifqi Abdul Rosyad. "KUALIFIKASI PEMIMPIN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2017 Publication	<1 %
59	hpempolis.wordpress.com Internet Source	<1 %
60	jatimprov.go.id Internet Source	<1 %
61	repository.unikama.ac.id Internet Source	<1 %
62	ritakasriwanti.blogspot.com Internet Source	<1 %
63	Submitted to University of Huddersfield Student Paper	<1 %
64	bakorwilmadiun.jatimprov.go.id Internet Source	<1 %

65	Nurul Azizah. "MUKJIZAT NARATOLOGIS: STUDI ANDRAGOGI ATAS KISAH MUSA-KHIDR DALAM SURAH AL-KAHFI 60-82", Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 2019 Publication	<1 %
66	Randolph DeLay. "Forming Knowledge: Constructivist Learning and Experiential Education", Journal of Experiential Education, 2016 Publication	<1 %
67	Joseph D. Novak, D. Bob Gowin, Jane Butler Kahle. "1 Learning about learning", Cambridge University Press (CUP), 1984 Publication	<1 %
68	www.mediaselektif.com Internet Source	<1 %
69	beritaakang.blogspot.com Internet Source	<1 %
70	teknologiterbaru4u.blogspot.com Internet Source	<1 %
71	Repository.Umsu.Ac.Id Internet Source	<1 %
72	Dewi Lutfianawati, Sri Maria Puji Lestari, Septa Istiana. "HUBUNGAN KESIAPAN BELAJAR MANDIRI DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA MAHASISWA TAHUN PERTAMA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MALAHAYATI TAHUN 2017",	<1 %

JURNAL ILMU KEDOKTERAN DAN KESEHATAN, 2019

Publication

73	journal.unj.ac.id Internet Source	<1 %
74	www.beritakorupsi.co Internet Source	<1 %
75	blog.ub.ac.id Internet Source	<1 %
76	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
77	rplblog008.blogspot.com Internet Source	<1 %
78	sumsel.bpk.go.id Internet Source	<1 %
79	Aprilia Rachmawati, Yakub Yakub, Dram Renaldi. "Pembuatan Program Aplikasi Pembelajaran Matematika Dasar Untuk Kelas 3 & 4 Pada SD Dharma Putra", Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer), 2015 Publication	<1 %
80	Submitted to Chattahoochee Valley Community College Student Paper	<1 %
81	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %

82	10017sra.blogspot.com Internet Source	<1 %
83	Sonyaruri Satiti. "GERAKAN AYO SEKOLAH DI KABUPATEN BOJONEGORO: PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN UNTUK MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI", Jurnal Kependudukan Indonesia, 2019 Publication	<1 %
84	mantangsamila.blogspot.com Internet Source	<1 %
85	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
86	www.banyumaskab.go.id Internet Source	<1 %
87	ban9.wordpress.com Internet Source	<1 %
88	ejurnal.unisri.ac.id Internet Source	<1 %
89	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
90	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
91	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
92	staff.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %

93

wahyukurniahamdani.blogspot.co.id

Internet Source

<1 %

94

www.kompasiana.com

Internet Source

<1 %

95

Retno Ardianti, N.A. Ingrid.
"Entrepreneurial motivation and
entrepreneurial leadership of
entrepreneurs: evidence from the formal
and informal economies", International
Journal of Entrepreneurship and Small
Business, 2018

Publication

<1 %

96

Semion Nuh, I Putu Ayub Darmawan, Edi
Sujoko. "IMPLEMENTASI PAK KONTEKS
GEREJA DI GKII TANDANG, SEMARANG",
Pengaruh: Jurnal Teologi Kristen, 2019

Publication

<1 %

97

Yulianta Saputra. "Pengawasan DPRD DIY
Terhadap Pemerintah Daerah Dalam
Penggunaan Dana Keistimewaan", Widya
Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan
Penelitian Hukum, 2019

Publication

<1 %

98

abdurrohimsyamsu.blogspot.com

Internet Source

<1 %

99

belajarhukumonline.wordpress.com

Internet Source

<1 %

100

eprints.upnyk.ac.id

Internet Source

<1 %

101 eprints.walisongo.ac.id
Internet Source

<1 %

102 jdih.batam.go.id
Internet Source

<1 %

103 journal.unika.ac.id
Internet Source

<1 %

104 jurnal-perspektif.org
Internet Source

<1 %

105 lib.ui.ac.id
Internet Source

<1 %

106 ptkguruku.blogspot.com
Internet Source

<1 %

107 puslit.dpr.go.id
Internet Source

<1 %

108 repo.iainbukittinggi.ac.id
Internet Source

<1 %

109 repository.syekhnurjati.ac.id
Internet Source

<1 %

110 www.arcjournals.org
Internet Source

<1 %

111 www.betantt.com
Internet Source

<1 %

112 www.daftarmatauangdunia.web.id
Internet Source

<1 %

113	www.demokrat.or.id Internet Source	<1 %
114	www.dpr.go.id Internet Source	<1 %
115	www.infomenia.net Internet Source	<1 %
116	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
117	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
118	Nandang Rukanda. "THE EFFECTIVENESS OF PARENTING MANAGEMENT TO IMPROVE PARENTS EMPOWERMENT (Case Study of Children's Play Group in Bani Shaleh Bandung)", Empowerment, 2018 Publication	<1 %
119	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
120	setwansergai.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
121	Airlangga Pribadi Kusman. "The Vortex of Power", Springer Science and Business Media LLC, 2019 Publication	<1 %
122	dprd.lampungengahkab.go.id Internet Source	<1 %

repository.upstegal.ac.id

123

Internet Source

<1 %

124

yakinkasihtafonao.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On